

**KONDISI KETENAGAKERJAAN  
DALAM PERSPEKTIF PERUBAHAN  
STRUKTUR DEMOGRAFI DAN SOSIAL  
EKONOMI :**

**DI KABUPATEN BANGKALAN  
JAWA TIMUR**

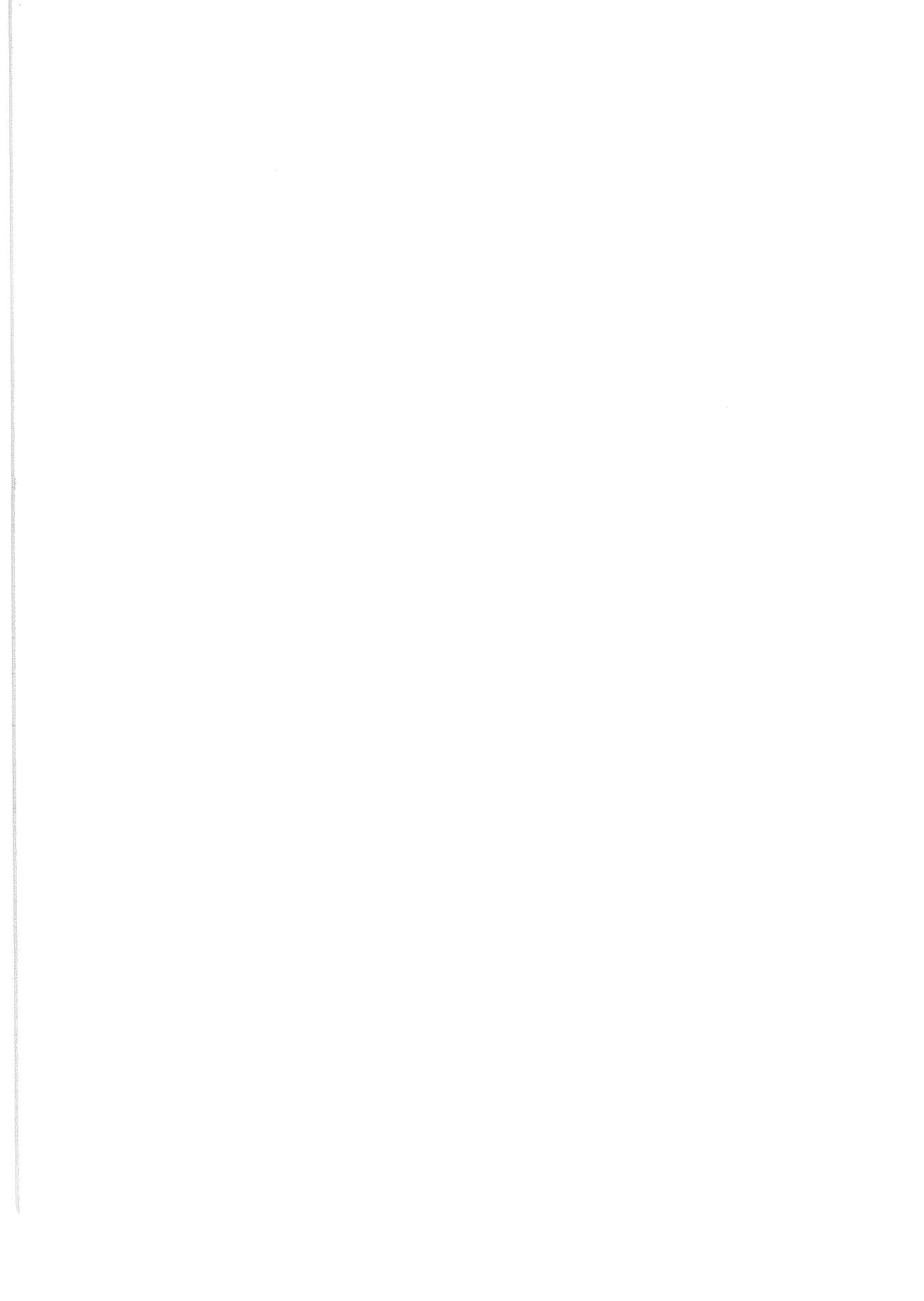
**PENULIS :**

**DALIYO  
DEVI ASIATI  
YB. WIDODO  
SRI HARGIONO**



**LIPI**

**PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
JAKARTA  
2006**



# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memetakan dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perubahan struktur demografi dan sosial ekonomi di Kabupaten Bangkalan selama 15 tahun terakhir. Di samping itu juga mengungkapkan isu-isu dan permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan. Sumber data yang digunakan dari data sekunder dan dokumentasi dari berbagai instansi di Kabupaten Bangkalan, seperti Bappeda, BPS, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan. Bahan juga dilengkapi dengan hasil wawancara dengan para informan di masing-masing instansi tersebut dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah mobilitas ke luar bagi penduduk Bangkalan sudah cukup lama. Laju pertumbuhan penduduk selama ini selalu menunjukkan pertumbuhan yang rendah (di bawah satu persen), terutama sebelum tahun 90-an. Namun pada tahun 2000-an laju pertumbuhan penduduk di kabupaten ini meningkat tajam mencapai di atas tiga. Ada perubahan struktur penduduk menurut umur selama 10 tahun terakhir (1995-2005), di mana jumlah dan proporsi penduduk muda makin menurun. Sedangkan jumlah dan proporsi penduduk dewasa dan lansia meningkat. Ini berarti bahwa di Kabupaten Bangkalan sudah terjadi transisi demografi, meskipun belum begitu drastis. Peningkatan penduduk usia dewasa akibat transisi demografi tersebut berarti juga terjadi peningkatan (jumlah dan proporsi) penduduk usia kerja dan sekaligus peningkatan jumlah angkatan kerja.

Selama 14 tahun terakhir telah terjadi transisi perekonomian dari sektor tradisional (sektor) ke sektor modern (sektor M dan S) meskipun belum begitu mencolok. Transisi tersebut juga berdampak terhadap penyerapan angkatan kerjanya, di mana proporsi mereka yang bekerja di sektor tradisional (sektor A) cenderung menurun, sedang di sektor modern (sektor M dan S) ada kecenderungan meningkat. Transisi penyerapan antar sektor tersebut juga tercermin dari status pekerjaannya, di mana mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu anggota keluarga dan pekerja keluarga cenderung menurun. Sedangkan mereka yang berstatus sebagai karyawan/ buruh dan berusaha dibantu buruh tetap cenderung terjadi peningkatan. Transisi penyerapan antar sektor tersebut juga disebabkan peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja. Transisi perekonomian dan transisi penyerapan angkatan kerja antar sektor tersebut telah mengakibatkan terjadinya penurunan *employment rate* di Kabupaten Bangkalan. Dampak yang menyedihkan adalah *unemployment*

*rate* cenderung terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa pengembangan perekonomian di sektor M dan S yang dikembangkan di Kabupaten Bangkalan belum mengarah ke padat karya atau yang menyerap angkatan kerja banyak.

## KATA PENGANTAR

Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan nasional ke depan terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Tantangan ini semakin berat karena Indonesia belum berhasil sepenuhnya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Dampak krisis ini memperburuk kondisi daya saing SDM Indonesia yang diindikasikan kualitasnya semakin menurun akibat meningkatnya jumlah penduduk yang relatif miskin dan tidak produktif (penganggur). Apabila keadaan ini terus berlanjut, dikuatirkan *demografic dividend*, yaitu keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya rasio ketergantungan akibat penurunan fertilitas dalam jangka panjang sulit diraih, bahkan sebaliknya akan semakin menjadi beban pembangunan.

Laporan mengenai 'Kondisi Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perubahan Demografi dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur' merupakan salah satu hasil kegiatan penelitian yang ditujukan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini merupakan tahap awal dari serangkaian penelitian yang berkelanjutan selama empat tahun (2006-2009). Sebagai suatu rangkaian penelitian, pada tahap pertama ini penelitian lebih menekankan kepada pemetaan tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan.

Kegiatan penelitian ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dan instansi terkait di lokasi penelitian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada anggota peneliti yang melakukan penelitian ini. Meskipun tim penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam batasan kemampuan yang dimiliki, namun kekurangan dan kekeliruan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk lebih sempurnanya buku ini.

Jakarta, Desember 2006  
Kepala Pusat Penelitian  
Kependudukan-LIPI

Dr. Ir. Aswatini, APU



# DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.6. Setting Wilayah Kabupaten Bangkalan	12
<b>BAB II    DINAMIKA PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA</b>	<b>15</b>
2.1. Jumlah dan Struktur Penduduk	15
• <i>Jumlah dan perubahan penduduk</i>	15
• <i>Kelahiran dan keluarga berencana</i>	16
• <i>Kematian</i>	17
• <i>Migrasi/ mobilitas penduduk</i>	17
• <i>Penyebaran dan kepadatan penduduk</i>	18
• <i>Struktur penduduk dan perubahan</i>	19
2.2. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja	23
• <i>Karakteristik angkatan kerja</i>	23
• <i>Pola perubahan angkatan kerja dan mencari kerja</i>	27
<b>BAB III    PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA</b>	<b>29</b>
3.1. Pertumbuhan Perekonomian	29
3.2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto	35
3.3. Perkembangan Investasi dan Iklim Usaha	37

<b>BAB IV</b>	<b>PENYERAPAN KERJA DAN PENGANGGURAN</b>	
	<b>ANGKATAN KERJA</b>	<b>51</b>
4.1.	Penyerapan Angkatan Kerja	51
	• <i>Lapangan kerja</i>	51
	• <i>Status pekerjaan</i>	55
	• <i>Tingkat pendidikan angkatan kerja</i>	56
4.2.	Pengangguran Angkatan Kerja	57
	• <i>Penganggur menurut umur dan jenis kelamin</i>	58
	• <i>Pendidikan penganggur</i>	60
	• <i>Setengah penganggur</i>	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :	Jumlah, Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan, Tahun 2005	19
Tabel 2.2 :	Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Tahun 1995, 2000 dan 2005	22
Tabel 2.3 :	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Laju Pertumbuhannya di Kabupaten Bangkalan, Tahun 1995 – 2005	22
Tabel 2.4 :	Jumlah Penduduk dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Tahun 1995, 2000 dan 2005.	23
Tabel 2.5 :	Struktur Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990, 2000 dan 2004.	24
Tabel 2.6 :	Karakteristik Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990, 2000 dan 2004	25
Tabel 3.1:	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan (Atas Dasar Harga Konstan 2000), Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2005 (Persen)	37
Tabel 3.2 :	Jumlah Industri Menurut Jenis Usaha, Tenaga kerja dan Investasi Kabupaten Bangkalan, Tahun 2005	39
Tabel 3.3:	Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja PMDN Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 – 2005	41
Tabel 3.4:	Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja PMA Kabupaten Bangkalan, Tahun 2002 – 2005	41
Tabel 3.5:	Proyek Pembangunan Sarana Sosial Ekonomi dan Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Kabupaten Bangkalan, Tahun 2002 – 2004	43

Tabel 3.6:	Panjang jalan menurut jenis dan kondisi di Kabupaten Bangkalan, Tahun 2002 dan 2005	44
Tabel 3.7:	Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Bangkalan Tahun 1995, 2000 dan 2005	45
Tabel 3.8:	Jumlah Lalu Lintas Pos di Kabupaten Bangkalan, Tahun 2000, 2005	46
Tabel 4.1:	Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990, 2000 dan 2004.	52
Tabel 4.2:	Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990, 2000 dan 2004 (Persen).	56
Tabel 4.3:	Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan-Pekerjaan dan Tk Pendidikan di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990, 2000 dan 2004.	57
Tabel 4.4:	Penganggur/ Pencari Kerja Menurut Umur di Kabupaten Bangkalan 1990, 2000 dan 2004 (Persen).	58
Tabel 4.5:	Penganggur/ Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bangkalan 1990, 2000 dan 2004 (Persen).	60
Tabel 4.6:	Penganggur/ Pencari Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Bangkalan 1990, 2000 dan 2004 (Persen)	61
Tabel 4.7:	Lowongan Kerja Yang Terdaftar, Pencari Kerja Yang Terdaftar, Ditempatkan dan Dihapuskan Menurut Pendidikan di Kabupaten Bangkalan, Desember 2005	62
Tabel 4.8:	Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Lapangan Kerja Di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990, 2000 dan 2004 (Persen).	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :	Peta Kabupaten Bangkalan	13
Gambar 2 :	Pertanian tanaman pangan Daerah Bangkalan	29
Gambar 3 :	Hasil Industri Kerajinan Batik Khas Madura di Bangkalan	32
Gambar 4 :	Jembatan SUROMADU direncanakan tahun 2008 selesai	33
Gambar 5 :	Sarana dan prasarana perhubungan darat di Kota Bangkalan	45



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Selama pemerintah orde baru program kependudukan mendapatkan perhatian yang cukup besar. Program yang cukup menonjol adalah program pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hasil pembangunan menjadi kurang berarti apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan. Program melalui keluarga berencana telah mampu menurunkan tingkat kelahiran di beberapa daerah secara nyata dalam kurun waktu 3 dasa warsa terakhir. Hasil yang cukup dirasakan adalah telah terjadinya perubahan struktur penduduk Indonesia (*demographic transition*) selama kurun waktu tersebut. Gambaran perubahan tersebut dapat disimak dari struktur penduduk menurut umur dalam bentuk piramida penduduk Indonesia yang sebelumnya (1970-an sampai 1980-an) didominasi oleh penduduk usia muda atau dalam *bentuk kerucut*, tetapi sejak pertengahan tahun 1990-an cenderung mengarah pada meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk tua atau dalam *bentuk oval*. Dalam hal ini berarti telah terjadi suatu proses perubahan stuktur penduduk dari struktur penduduk muda ke arah struktur penduduk dewasa.

Dalam jangka panjang, perubahan struktur umur ini akan berdampak terhadap perubahan sosial ekonomi diantaranya : peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif, akumulasi kekayaan yang lebih besar dan tersedianya modal manusia yang makin besar. Hal ini akan tercapai apabila terdapat kondisi yang mendukungnya, yaitu : pertama, tersedia kesempatan kerja yang produktif sehingga mampu meningkatkan *total output* dari tenaga kerja. Kedua, terdapat tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif. Ketiga, terdapat kebijakan investasi yang khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga berarti rasio beban tanggungan keluarga akan semakin berkurang, sehingga memberi peluang untuk mendapatkan bonus demografi, yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Bonus demografi juga memberi peluang terbukanya *window oppurtunity* pada tahun 2020-2030, di mana rasio ketergantungan mencapai titik terendah (Moertiningsih, 2005). Namun demikian, kondisi tersebut membawa konsekuensi, yaitu akan menjadi masalah besar jika lapangan kerja dan penguasaan terhadap aset produktif,

terutama untuk dapat bekerja tidak cukup memadai, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Transisi lain yang berkaitan dengan pengembangan SDM adalah perubahan struktur ekonomi yang semakin mengarah pada berkembangnya sektor industri pengolahan dan jasa, sejalan dengan semakin berkurangnya peran sektor primer (pertanian) dalam kegiatan ekonomi. Secara teoritis kecenderungan ini mengindikasikan adanya kemajuan kegiatan ekonomi suatu negara (Mirdal, 1986), sekaligus membawa konsekuensi persaingan yang semakin ketat dan penyesuaian penyediaan kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penempatan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan suatu wilayah, memerlukan strategi pembangunan yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan hasilnya. Strategi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kesenjangan sosial ekonomi yang banyak terjadi di negara berkembang, sebagai dampak dari pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai dalam proses pembangunan adalah terciptanya kesempatan kerja, baik dilihat dari peningkatan jumlah maupun kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Bertambahnya angkatan kerja tentu saja berpengaruh terhadap jumlah pencari kerja yang harus disertakan dalam kegiatan ekonomi (bekerja). Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi dalam percepatan pembangunan suatu wilayah. Namun demikian jumlah yang besar juga berpotensi menjadi masalah atau beban pembangunan, apabila kualitasnya tidak sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pertumbuhannya tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Dalam menghadapi abad 21, kondisi ketenagakerjaan Indonesia masih dihadapkan pada tantangan yang sangat berat, terutama berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan bersaing, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia, Indonesia dihadapkan pada masalah jumlah angkatan kerja yang melimpah. Pada tahun 2002, jumlah angkatan kerja mencapai 100,8 juta orang atau 67,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Setiap tahunnya ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru memasuki pasar kerja (Bappenas, 2002). Berdasarkan proyeksi data SUPAS 1995 diperkirakan jumlah angkatan kerja

masih akan bertambah dari 106,8 juta pada tahun 2005 menjadi 148,5 juta pada tahun 2025 (Moertiningsih, 2005).

Indonesia termasuk negara dengan surplus tenaga kerja. Hal ini berarti terdapat ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan dengan ketersediaan kesempatan kerja. Dampak dari ketimpangan ini adalah timbulnya masalah pengangguran yang serius, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia termasuk penganggur dan atau setengah penganggur, sehingga menjadi salah satu isu pokok dalam pembangunan nasional. Berdasarkan berbagai data Sakernas dari BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan diperkirakan mencapai sekitar 10 persen pada tahun 2004 (Widianto, 2005). Tingkat pengangguran lebih mencolok terjadi di kalangan penduduk usia muda, relatif berpendidikan, perempuan dan tinggal di daerah perkotaan. Selain permasalahan terbatasnya lapangan pekerjaan, permasalahan ketenagakerjaan lainnya berkaitan dengan kualitas pekerjaan seperti masih didominasi sektor informal, masalah keselamatan kerja, diskriminasi tempat kerja, dan masalah kecukupan upah/penghasilan. Permasalahan ketenagakerjaan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di berbagai daerah, terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Sebagai ilustrasi, pada tahun 1997 pengangguran terbuka tercatat sekitar 4,7 persen, kemudian meningkat menjadi 6,9 persen (tahun 1999), 8,1 persen (tahun 2001), 9,1 persen (tahun 2002). Hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah meningkatnya pengangguran pada kelompok usia muda (15-24) dan relatif berpendidikan (SLTA ke atas). Terbatasnya kesempatan kerja bagi kelompok tersebut, sangat potensial menimbulkan kerawanan sosial politik, yang dapat berdampak pada kestabilan pembangunan umumnya.

Masalah ketenagakerjaan lainnya adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, dilihat dari tingkat pendidikan formal dan penguasaan keterampilan, masih mendominasi ketenagakerjaan pada umumnya. Diperkirakan lebih dari separuh angkatan kerja (sekitar 55 persen) berpendidikan tamat Sekolah Dasar atau kurang, dan hanya sekitar 3 persen lulusan Perguruan Tinggi. Jika indeks mutu kehidupan penduduk diukur dari wajib menempuh pendidikan dasar (wajib) 9 tahun, maka dapat dipastikan bahwa separuh dari penduduk Indonesia berpendidikan rendah (Pranadji, 2004). Berdasarkan laporan tahunan tentang *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilakukan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)*, menempatkan SDM Indonesia pada posisi rendah dibandingkan negara-negara lain termasuk ASEAN. Pada tahun 1997 IPM Indonesia berada pada peringkat 99 dari 175 negara di dunia, dan menurun pada peringkat 112 pada tahun 2003. Posisi Indonesia hanya berada di atas negara-

negara seperti Myanmar (urutan ke 131) dan Kamboja (urutan ke 130) di ASEAN. Pada tahun 2004, IPM Indonesia berada pada peringkat 111 dari 175 negara, satu tingkat di atas Vietnam.

Terkait dalam globalisasi ekonomi, sejak tahun 2003 Indonesia dihadapkan pada era persaingan antar negara yaitu *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tahun 2020. Makin longgarnya batas antar negara sebagai konsekuensi globalisasi, maka perpindahan arus barang dan jasa, seperti modal, produk dan tenaga kerja akan semakin bebas di antara negara-negara tersebut. Perkembangan tersebut dapat berdampak positif dan negatif bagi negara Indonesia. Menjadi peluang bagi Indonesia karena dapat mengaktifkan roda perekonomian nasional, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja baru. Namun juga dapat berdampak negatif apabila tenaga kerja Indonesia tidak mampu mengisi lapangan kerja sesuai dengan kualifikasi pekerjaan, sehingga justru memberi peluang masuknya tenaga kerja asing yang lebih kompetitif. Di sisi lain, produk-produk pertanian dan industri yang berkualitas dari negara lain bebas masuk ke Indonesia, sehingga dapat menjadi ancaman bagi produk dalam negeri yang kalah bersaing baik dalam mutu maupun harga.

Permasalahan - permasalahan di atas menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan nasional ke depan terutama terkait dengan aspek ketenagakerjaan. Tantangan ini semakin berat karena Indonesia belum berhasil sepenuhnya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997. Dampak krisis ini memperburuk kondisi daya saing SDM Indonesia yang diindikasikan semakin menurun kualitasnya akibat meningkatnya jumlah penduduk yang relatif miskin dan tidak produktif (penganggur). Apabila keadaan ini terus berlanjut, dikuatirkan bonus demografi sulit diraih, bahkan sebaliknya akan semakin menjadi beban pembangunan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka kajian tentang Pengembangan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Perubahan Struktur Demografi dan Sosial Ekonomi di daerah penting untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan tahap awal dari serangkaian penelitian yang berkelanjutan selama lima tahun. Sebagai suatu rangkaian penelitian, pada tahap awal ini penelitian lebih menekankan pada pemetaan kondisi ketenagakerjaan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dengan mendasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan 'bagaimana peta kondisi ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perubahan demografi, sosial dan ekonomi serta

implikasi dari pengembangan ketenagakerjaan di daerah'. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : Pertama, bagaimana perubahan peta ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perubahan struktur penduduk dan perubahan sosial ekonomi di tingkat kabupaten/ kota. Kedua, apakah isu-isu dan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi daerah dan kebijakan-kebijakan apa yang sudah dan akan dilakukan.

### **1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengkaji kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi. Adapun secara khusus tujuan penelitian adalah :

1. Memetakan dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan perubahan struktur demografi dan sosial ekonomi di Kabupaten Bangkalan selama 15 tahun terakhir.
2. Mengungkapkan isu-isu dan permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan.
3. Mengkaji kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan.

#### *Sasaran*

1. Memberikan informasi tentang kondisi ketenagakerjaan dan isu pengembangan ketenagakerjaan dalam kaitan dengan perubahan struktur demografi dan social-ekonomi di daerah.
2. Memberikan masukan tentang pengembangan ketenagakerjaan sebagai alternatif bahan pertimbangan penyusunan kebijakan bagi pengambil keputusan.
3. Membangun kerjasama dengan *stakeholders* pengguna terutama pemerintah daerah terkait.

## 1.4. Ruang Lingkup Penelitian

### *Substansi*

Secara substansi penelitian ini difokuskan pada pemetaan kondisi atau struktur ketenagakerjaan di daerah. Struktur ketenagakerjaan, meliputi jumlah dan komposisi angkatan kerja yang bekerja dan mencari kerja. Angkatan kerja yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan dan status pekerjaan akan dilihat menurut komposisi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jam kerja, upah, desa-kota. Sedang angkatan kerja yang mencari kerja dilihat menurut komposisi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, desa-kota.

Perubahan struktur demografi meliputi jumlah, komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan sebagainya, serta persebaran penduduk menurut kabupaten/kota dan desa-kota. Perubahan ekonomi meliputi PDRB/kapita, pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Sedang perubahan sosial meliputi antara lain pendidikan, kesehatan dan mobilitas penduduk.

### *Lokasi*

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Daerah penelitian dipilih berdasarkan pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu Propinsi Jawa Timur, mewakili provinsi di Pulau Jawa yang memiliki IPM rendah. Penentuan kabupaten dilakukan berdasarkan hasil kajian data sekunder, yang dilakukan sebelum melakukan penelitian ke lapangan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah kabupaten/kota yang memiliki IPM kelompok rendah dan persentase penduduk miskin tinggi. IPM yang rendah mengindikasikan kualitas sumber daya manusia termasuk angkatan kerjanya masih rendah, baik dalam arti tingkat pendidikan dan ketrampilannya maupun tingkat kesehatannya. Di samping itu, juga tingkat produktivitas tenaga kerjanya juga masih rendah. Hal tersebut tercermin dari pendapatan rumah tangga dan per kapitanya yang masih rendah. Apabila kondisinya demikian berarti kualitas sumber daya manusia daerah tersebut perlu ditingkatkan. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut, perlu peta tentang kondisi ketenagakerjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## *Kerangka Berpikir*

Struktur ketenagakerjaan yang meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jumlah tenaga kerja yang terserap serta jumlah pencari kerja, dipengaruhi oleh variabel demografi penduduk, sosial dan ekonomi. Angkatan kerja adalah segmen penduduk usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang memasuki pasar kerja (bekerja dan mencari kerja). Jumlah dan komposisi angkatan kerja dipengaruhi oleh besarnya jumlah dan komposisi penduduk. Semakin besar jumlah penduduk cenderung semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitu juga dengan besarnya jumlah angkatan kerja pada masing-masing wilayah ditentukan oleh persebaran penduduk secara geografis. Jumlah penduduk suatu daerah selain ditentukan oleh tingkat fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan mobilitas (perpindahan), juga dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi penduduk, dan sebaliknya. Perkembangan ekonomi meliputi PDRB/kapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.

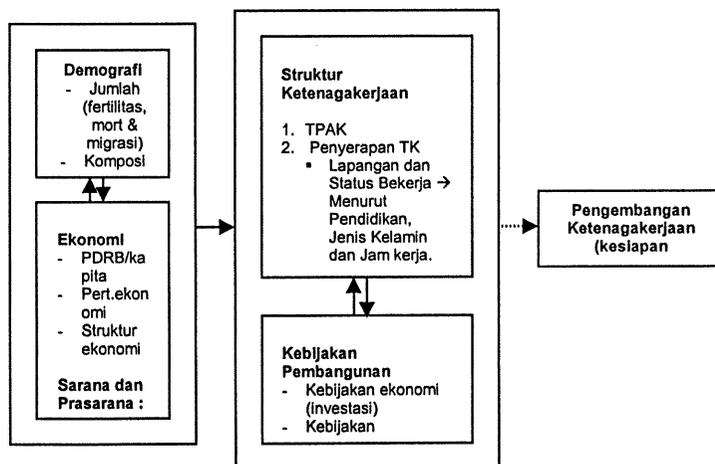
Angkatan kerja dapat menjadi modal pembangunan apabila angkatan kerja dapat terserap dalam pasar kerja. Dengan kata lain, kegiatan pembangunan yang dicapai harus dapat menyerap pencari kerja (penganggur) dan tambahan angkatan kerja baru. Keadaan ini dapat terjadi jika pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja sejalan dengan pertumbuhan kesempatan kerja, yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan perekonomian suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai akibat situasi perekonomian secara makro mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan. Semakin meningkat kegiatan ekonomi maka permintaan tenaga kerja juga semakin meningkat. Dalam model produksi Cobb Douglass (Dernber and Mc Dougall, 1972), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga kerja. Dalam hal ini, tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu kegiatan ekonomi. Kebijakan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja sehingga tercipta keadaan yang mengarah pada *full employment*. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan perluasan dunia usaha yang akan menciptakan kesempatan kerja baru.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi cenderung menyebabkan perubahan struktur tenaga kerja. Dalam hal ini, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian cenderung semakin menurun dan peranan sektor industri dan jasa semakin meningkat. Perubahan vertikal dari pekerjaan dengan tingkat upah dan

produktivitas rendah ke pekerjaan yang mempunyai tingkat upah dan produktivitas yang lebih tinggi. diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal ini memungkinkan apabila terdapat peningkatan kualitas tenaga kerja, sehingga potensial meningkatkan produktivitas kerja. Sebagai negara yang bercirikan *labour surplus economy*, Indonesia menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang cukup serius, terutama masalah pengangguran yang terus bertambah. Menurut Hidayat (1983), terdapat dua masalah pokok dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, yaitu pertama kurang pengembangan (*underdevelopment*) dalam hal terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan kedua, kurang pencurahan (*underutilized*) sumber daya manusia, dilihat dari pengangguran terbuka, jam kerja yang minim, upah rendah dan penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan pendidikan. Indikasi rendahnya kualitas SDM tersebut masih berlangsung sampai sekarang, sehingga merupakan suatu tantangan bagi pengembangan ketenagakerjaan di masa depan.

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001 memberi kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk menentukan pembangunan di daerah termasuk pengembangan sumber daya manusia. Di satu sisi kewenangan yang lebih besar memberi keleluasaan bagi daerah dalam mengembangkan ketenagakerjaannya, di sisi lain pemerintah daerah perlu kesiapan dalam mengelola sumber daya di daerahnya. Dalam otonomi daerah ini memberi kesempatan daerah untuk memahami kebutuhan dan kepentingan daerahnya, dalam hal ini khususnya dalam usaha perbaikan ketenagakerjaan di wilayahnya.

### Skema Kerangka Berfikir



### *Konsep Definisi*

Di bawah ini dikemukakan beberapa konsep definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini. Beberapa konsep definisi operasional tersebut sebagai berikut :

- *Pengembangan ketenagakerjaan* didefinisikan sebagai: upaya (kebijakan dan program) yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan menciptakan kesempatan kerja bagi pencari kerja sehingga tercapai keadaan *full employment*. Pengembangan ketenagakerjaan merupakan tujuan akhir dari serangkaian penelitian selama 5 tahun. Dalam penelitian pada tahun pertama ini, dengan struktur ketenagakerjaan yang ada bagaimana pengembangan ketenagakerjaan ke depan dan sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan ketenagakerjaan.
- *Perubahan struktur demografi* dilihat dari perubahan jumlah penduduk, komposisi dan distribusi penduduk Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.
- *Perubahan ekonomi* definisikan sebagai perubahan keadaan perekonomian penduduk secara makro yang dilihat dari PDRB/kapita, pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi.
- *Perubahan sosial* didefinisikan sebagai perubahan kehidupan sosial masyarakat. Variabel social yang berpengaruh terhadap keadaan social masyarakat yang dilihat dalam penelitian ini adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta bagaimana akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana tersebut.
- *Peta atau struktur ketenagakerjaan* dilihat dari tiga aspek yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jumlah dan komposisi angkatan kerja yang bekerja dan jumlah dan komposisi pencari kerja (pengangguran). Komposisi angkatan kerja yang bekerja dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan dan status pekerjaan meliputi jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, desa kota, jam kerja. Sedang pencari kerja dilihat menurut komposisi jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.
- *Angkatan Kerja* adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Batasan umur dalam pengelompokan angkatan kerja yang digunakan adalah menurut definisi BPS sesuai dengan data yang digunakan, yaitu Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004.

- *Bekerja* adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh pendapatan, paling sedikit 1 jam selama seminggu (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Mencari kerja adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey orang tersebut sedang mencari pekerjaan. Konsep bekerja dan mencari kerja menggunakan definisi BPS sesuai dengan data yang digunakan

### *Hipotesis / Preposisi*

1. Perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi berpengaruh terhadap kondisi dan pengembangan ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Perubahan struktur demografi dan sosial-ekonomi berpengaruh terhadap kebijakan dalam pengembangan ketenagakerjaan.

Kedua hipotesa/preposisi di atas tidak dimaksudkan untuk diuji dalam kajian ini, tetapi lebih merupakan asumsi awal untuk mengarahkan peneliti dalam menganalisis isu pengembangan ketenagakerjaan di daerah penelitian

## **1. 5. Metodologi Penelitian**

### *Pendekatan penelitian*

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif yang dianalisis secara deskriptif analisis. Pendekatan kuantitatif menggunakan pengolahan data sekunder, yaitu data yang dikeluarkan oleh BPS maupun data sekunder lainnya baik yang berasal dari Dinas Tenaga Kerja (pusat dan daerah) maupun data dari Pemerintah Daerah. Data kuantitatif digunakan untuk memetakan dan menganalisis kondisi ketenagakerjaan dan perubahan struktur demografi dan sosial ekonomi. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mengkaji lebih mendalam tentang isu dan permasalahan ketenagakerjaan, dalam konteks perubahan demografis, sosial dan ekonomi, yang diperoleh dari analisis data sekunder sebelum ke lapangan, serta isu-isu terkait dengan pengembangan ketenagakerjaan di daerah dalam.

### *Sumber data*

Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS baik dari tingkat pusat maupun tingkat Kabupaten

Bangkalan, yaitu data Sensus Penduduk 1990, 2000 dan data Susenas 2004. Data tersebut digunakan untuk melihat perubahan struktur demografi dan sosial ekonomi penduduk serta kondisi ketenagakerjaan meliputi penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Data lainnya bersumber dari data sekunder yang dikeluarkan oleh dinas dan instansi terkait serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, seperti 'Kabupaten Bangkalan Dalam Angka' dan data lainnya yang dapat mendukung.

Data kualitatif merupakan hasil wawancara mendalam dengan para narasumber yang relevan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Bangkalan. Mereka adalah para pejabat/ staf Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal, BKKBN dan lainnya yang terkait .

### *Teknik pengumpulan data*

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder akan diperoleh dari hasil publikasi/dokumen instansi pemerintahan seperti BPS, Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, dan institusi terkait. Sementara data primer akan dikumpulkan melalui serangkaian teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi kepustakaan (*desk review*).

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan dipilih secara purposif. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi beberapa variabel dari permasalahan penelitian. Pedoman wawancara disusun melalui diskusi intensif berdasarkan variabel yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### *Analisis data*

Dalam penelitian ini, data kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan data sekunder, yang meliputi variabel-variabel demografi dan sosial ekonomi yang mempengaruhi struktur ketenagakerjaan. Analisis data sekunder dilakukan sebelum melakukan pengumpulan data lapangan untuk mendapatkan gambaran awal tentang isu ketenagakerjaan yang dialami selama dilapangan. Sementara data kualitatif dianalisis untuk memberikan pendalaman isu dan permasalahan ketenagakerjaan berkaitan dengan kecenderungan perubahan struktur demografi, sosial ekonomi dan struktur

tenaga kerja. Berdasarkan isu dan permasalahan tersebut diperoleh isu dan permasalahan untuk pengembangan ketenagakerjaan.

### *Pemilihan informan*

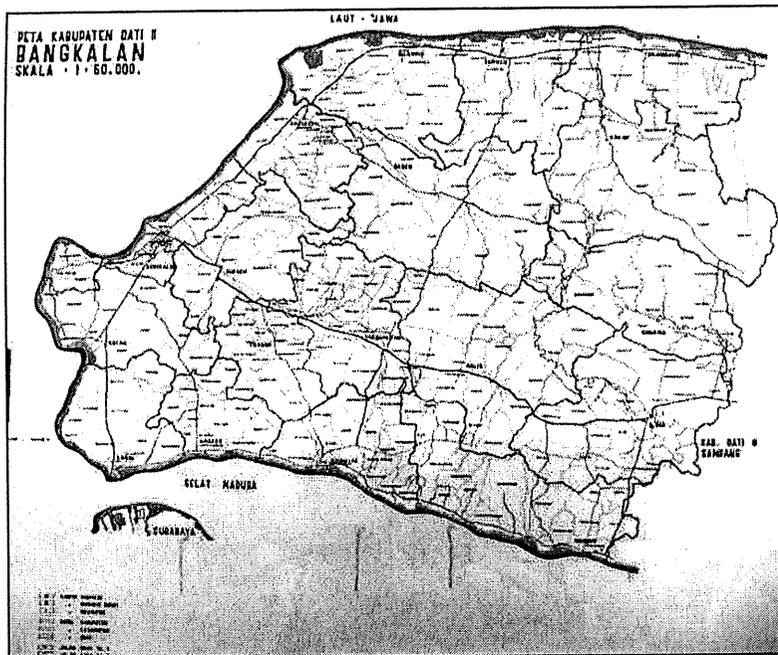
Informan dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang diduga sangat berkompeten dengan permasalahan ketenagakerjaan di daerah penelitian. Dalam hal ini, ada tiga kelompok besar yang menjadi informan dalam penelitian ini :

1. Pejabat instansi pemerintah di Kabupaten Bangkalan, antara lain Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal, Dinas Pendidikan, BKKBN, dan instansi terkait lainnya.
2. Kelompok usaha dan pengusaha di Kabupaten Bangkalan
3. Kelompok masyarakat yang terdiri dari para akademisi dan lembaga swadaya masyarakat terkait dengan subyek penelitian.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snow ball*, yaitu pemilihan informan dilakukan berdasarkan informasi awal yang mengetahui dan memahami permasalahan. Teknik ini digunakan sebagai *check dan balanced* informasi yang didapatkan serta untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan utuh.

### **1.6. Seting Wilayah Kabupaten Bangkalan**

Bangkalan merupakan salah satu dari 29 kabupaten di Provinsi Jawa Timur atau satu dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Wilayah Bangkalan terletak di ujung barat Pulau Madura dan berbatasan dengan kota metropolitan Surabaya. Wilayah ini merupakan salah satu 'botabeknya' atau 'hinterland' kota besar Surabaya. Sayangnya sampai tahun 2006 ini jembatan Suramadu yang direncanakan untuk menghubungkan kota Surabaya dan wilayah Bangkalan belum selesai dibangun. Diperkirakan pada tahun 2008 akan selesai dibangun. Apabila jembatan tersebut telah selesai, wilayah ini dapat menikmati perluasan pengembangan ekonomi Kota Surabaya. Berbagai perusahaan/ industri dan fasilitas pelabuhan yang tidak mungkin lagi dibangun di Kota Surabaya karena keterbatasan lahan dapat dialihkan ke wilayah Bangkalan. Dampak positifnya berbagai kesempatan kerja dan fasilitas ekonomi dapat dikembangkan di wilayah ini.



Gambar 1 : Peta Kabupaten Bangkalan

Jarak wilayah kabupaten ini dengan Kota Surabaya hanya sekitar 3 km. Alat transportasi umum yang utama adalah bus antar kota dan antar provinsi serta kapal feri atau kapal penyeberangan. Bus-bus yang melayani daerah ini tidak hanya menghubungkan kota Surabaya dan wilayah Bangkalan serta kabupaten di Madura lainnya, namun juga bus-bus rute dari Jakarta – Madura.

Peran Kabupaten Bangkalan ini juga merupakan pintu masuk jalur lalu lintas dari luar pulau ke Pulau Madura, baik melalui laut maupun melalui darat setelah kapal penyeberangan. Dalam rencana pembangunan daerah, pelabuhan laut akan dibangun di wilayah Kabupaten Bangkalan, tepatnya di daerah Bulu Pandan (Pemprop. Jawa Timur, 2005). Apabila pembangunan pelabuhan tersebut terlaksana perekonomian daerah ini semakin mengalami kemajuan. Produk-produk baik pertanian maupun nonpertanian dari wilayah Bangkalan dan kabupaten lainnya dapat langsung dikirim ke luar tanpa melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dengan adanya pelabuhan berbagai lapangan kerja bagi penduduk Bangkalan dapat tercipta.

Luas wilayah Kabupaten Bangkalan sekitar 1.260,14 km<sup>2</sup> atau 23,4 persen dari luas wilayah Pulau Madura dan 2,4 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Wilayah kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan, di mana

sebanyak 10 kecamatan memiliki wilayah pantai. Sebagian penduduk wilayah tersebut memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian lainnya sebagai petani. Ada 8 kecamatan yang wilayahnya di pedalaman atau tidak memiliki wilayah perbatasan pantai dan sebagian besar penduduknya sebagai petani lahan kering dan pertanian sawah tadah hujan.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bangkalan merupakan daerah dataran. Dataran ini membentang dari pantai ke pedalaman. Sebagian kecil yang lain merupakan perbukitan. Potensi alam di daerah perbukitan tersebut kurang cocok untuk tanaman pangan, sebab tanahnya kurang subur dan belum tersedia air irigasi. Sebagian persawahan di daerah ini merupakan sawah tadah hujan. Dalam satu tahun hanya dapat ditanami padi satu kali pada musim penghujan, kemudian pada musim kemarau hanya dapat ditanami tanaman palawija. Di daerah dataran ada sebagian wilayahnya merupakan persawahan.

## BAB II

# DINAMIKA PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA

Bagian ini membahas tentang kondisi dinamika kependudukan Kabupaten Bangkalan selama 15 tahun terakhir dan menganalisa dampaknya terhadap ketenagakerjaan, utamanya penduduk usia kerja. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh penambahan penduduk alami dan penambahan karena faktor migrasi. Penurunan tingkat fertilitas sebagai hasil pelaksanaan program keluarga berencana di beberapa provinsi Indonesia termasuk Jawa Timur telah mampu menurunkan proporsi penduduk usia muda. Penurunan proporsi penduduk usia muda yang terus berlangsung akan meningkatkan proporsi penduduk usia dewasa atau penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perubahan penurunan proporsi penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk dewasa dan usia lanjut tersebut dapat dikatakan sebagai proses transisi demografi. Dampak dinamika kependudukan tersebut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan tenaga kerja, angkatan kerja dan *employment* (Ananta, 1995). Meningkatnya penduduk usia kerja akan sangat berarti bagi perekonomian di suatu daerah apabila potensi penduduk tersebut dapat dimanfaatkan secara ekonomis.

### 2.1. Jumlah dan struktur penduduk

#### *Jumlah dan pertumbuhan penduduk*

Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan pada tahun 1980 sebanyak 688.362 orang, sekitar 25 persen penduduk Pulau Madura atau hanya 2,3 persen dari penduduk Jawa Timur. Jumlah penduduk tersebut pada tahun 1990 telah meningkat menjadi 750.740 orang dan meningkat lagi menjadi 787.428 orang pada tahun 2000. Pada tahun 2005 angka tersebut telah menjadi 926 559 orang. Dilihat dari tingkat pertumbuhannya selama periode 1980-1990 telah terjadi laju pertumbuhan 0,87 per tahun (BPS, 1992). Pada periode selanjutnya (1990 – 2000) terjadi laju pertumbuhan hanya mencapai 0,48 persen per tahun. Hal yang menarik ternyata selama 5 tahun terakhir (2000-2005) mengalami peningkatan yang cukup tajam 3,3 persen per tahun. Dengan membandingkan pertumbuhan penduduk tahun 80-an dengan tahun 90-an dan tahun 2000-an ada fluktuasi laju pertumbuhan penduduk. Dari data BPS (1992) laju pertumbuhan sejak tahun tahun 1961 sampai tahun 1990 selalu menunjukkan angka yang rendah, yakni di bawah angka satu persen per tahun. Hal tersebut mengingat potensi alam Kabupaten Bangkalan yang

relatif terbatas dan kesempatan kerja yang sangat terbatas, sehingga kemungkinan waktu itu terjadi mobilitas penduduk ke luar yang cukup berarti. Namun mengapa kemudian sejak tahun 2000-an rata-rata laju pertumbuhan menjadi 3,3 persen per tahun. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang mencolok tersebut nampaknya bukan disebabkan faktor pertumbuhan alami, kemungkinan besar disebabkan adanya migrasi penduduk yang masuk Bangkalan selama periode tersebut. Migrasi tersebut adalah baik karena adanya migran dari penduduk luar yang masuk Bangkalan dan juga mungkin adanya migran kembali. Migran kembali bisa terjadi karena alasan keamanan, seperti kasus konflik yang terjadi di Sampit beberapa tahun yang lalu. Konflik yang melibatkan penduduk keturunan suku Madura dengan suku Dayak. Kasus tersebut yang menyebabkan banyak orang-orang Madura terusir dari Sampit dan kembali ke daerah asalnya di Madura termasuk Bangkalan.

### *Kelahiran dan keluarga berencana*

Untuk pembahasan tentang tingkat kelahiran di Kabupaten Bangkalan sangat terbatas, karena keterbatasan data yang tersedia. Namun dengan kelangkaan data tersebut informasi kelahiran dapat diprediksi dengan melihat program keluarga berencana yang telah dilakukan di kabupaten ini sampai tahun 2000-an cenderung berjalan baik. Hal ini terefleksi dari tingkat realisasi pencapaian akseptor dari tahun 2000 sampai tahun 2005 cenderung terus meningkat. Pada tahun 2000 tingkat pencapaian target akseptor KB hanya 82,5 persen, namun pada tahun 2005 telah mencapai 110,5 persen. Kemudian sebagian besar (70 persen) akseptor tersebut menggunakan alat kontrasepsi modern dengan tingkat kegagalan yang rendah, seperti suntik, IMP, IUD dan MOP/MOW. Sementara akseptor yang menggunakan pil dan kondom hanya sebanyak 30 persen. Keberhasilan program tersebut nampaknya cukup berpengaruh terhadap penurunan tingkat kelahiran, terutama setelah tahun 2000. Penurunan tingkat kelahiran tersebut dapat dilihat dari perubahan komposisi penduduk menurut umur apabila membandingkan data tahun 2000 dan tahun 2005 (Tabel 3.2). Dengan membandingkan dua komposisi umur penduduk tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan proporsi penduduk usia kurang dari 5 tahun mengalami penurunan yang cukup berarti. Perubahan komposisi penduduk menurut umur ini akan dibahas lebih rinci di bagian selanjutnya. Dengan demikian kenaikan laju pertumbuhan penduduk di Bangkalan yang tinggi tersebut bukan lagi dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan alami sebagai faktor utamanya, namun lebih banyak disebabkan oleh faktor migrasi.

## *Kematian*

Tingkat kematian terutama tingkat kematian bayi di Kabupaten Bangkalan masih agak tinggi. Pada tahun 2002 tingkat kematian bayi di kabupaten tersebut masih mencapai sekitar 64/ 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih jauh di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai 47/ 1.000 kelahiran hidup dan juga angka nasional 43,5/ 1.000 kelahiran hidup. Ini menunjukkan pola hidup sehat dan pemanfaatan fasilitas kesehatan modern belum begitu tinggi. Dari buku 'Indonesia Human Development Report 2004' yang disusun BPS bekerjasama dengan Bappenas dan UNDP menunjukkan bahwa penduduk yang mengobati sendiri di kabupaten ini cukup besar 64,4 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan angka nasional. Kondisi tersebut juga didukung oleh beberapa indikator sosial ekonomi lainnya yang belum begitu tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur dan nasional. Indikator tersebut antara lain angka harapan hidup masih rendah (61,4 tahun), tingkat literasi masih rendah (73, 6 persen), rata-rata lama sekolah penduduk juga lebih rendah (5 tahun), pengeluaran per kapita juga rendah (Rp 584 ribu), akses terhadap fasilitas kesehatan juga rendah (47,6 persen), rata-rata lama sakit juga cukup tinggi (6,4 hari) dan persalinan dengan pertolongan tenaga medis juga masih rendah (47,3 persen) (BPS & Bappenas, UNDP).

## *Migrasi/ mobilitas penduduk*

Mobilitas orang Madura termasuk dari Bangkalan sudah cukup lama dilakukan, bahkan menurut sejarah pada tahun 1800-an mobilitas ke luar orang Madura tersebut telah banyak terjadi. Kebanyakan mereka mengadakan mobilitas ke Jawa, antara lain Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Gresik dan daerah lainnya (Kuntowijoyo, tanpa tahun). Mobilitas yang dilakukan mencakup mobilitas permanen (migrasi) maupun sementara. Mereka meninggalkan daerahnya karena didorong oleh kondisi alamnya yang tidak dapat memberikan banyak kesempatan kerja. Mobilitas sementara biasanya dilakukan pada musim kemarau, di mana daerahnya kering dan tidak ada aktivitas pertanian. Mereka merantau ke Jawa bagian timur. Mobilitas penduduk tersebut terus berlangsung sampai abad 20-an. Nampaknya hal tersebut berlanjut terus sampai tahun 90-an. Hal tersebut terbukti dengan laju pertumbuhan penduduk terutama Kabupaten Bangkalan selalu di bawah angka satu. Hanya sejak awal tahun 2000-an seperti telah diungkap di subbab di atas laju pertumbuhan penduduk pada periode tersebut meningkat tajam. Laju pertumbuhan penduduk Bangkalan karena sebab utama penambahan alami nampaknya tidak mungkin, sangat mungkin laju pertumbuhan tersebut karena adanya migrasi masuk. Meningkatnya migran

masuk dapat disebabkan meningkatnya peluang/ kesempatan kerja yang dikembangkan di Kabupaten Bangkalan dan adanya kasus konflik Sampit beberapa tahun yang mengakibatkan banyak orang Madura yang kembali ke daerah asalnya. Apalagi apabila pada tahun 2008 nanti jembatan SURAMADU telah selesai dibangun, banyak peluang usaha dan kesempatan kerja yang dapat tercipta, sehingga makin menarik adanya arus migrasi masuk ke wilayah Bangkalan.

#### *Penyebaran dan kepadatan penduduk*

Kecamatan - kecamatan di Kabupaten Bangkalan tersebar di wilayah seluas 1.260,14 km<sup>2</sup>. Kecamatan yang relatif luas (di atas 80 km<sup>2</sup>) umumnya terdapat di daerah pedalaman (*kecamatan pedalaman*), seperti Kecamatan Konang, Blega, Galis, Geger dan Kokop. Sementara wilayah kecamatan yang memiliki pantai (*kecamatan pantai*) umumnya hanya seluas kurang dari 80 km<sup>2</sup>. Penduduk Kabupaten Bangkalan tersebar di 18 kecamatan dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi kebanyakan di wilayah kecamatan pantai. Hal itu disebabkan pengembangan fasilitas transportasi dan komunikasi lebih banyak dilakukan di wilayah pantai. Daerah-daerah yang kepadatan penduduknya tinggi (di atas 900 orang/ km<sup>2</sup>) terdapat di Kecamatan Kamal, Labang, Kwanyar, Socah, Bangkalan dan Arosbaya). Rata-rata jumlah anggota rumah tangga, ada kecenderungan untuk kecamatan pedalaman relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di kecamatan pantai. Berbagai faktor sosial ekonomi masyarakat mungkin berpengaruh terhadap jumlah anak yang dimiliki, termasuk adanya perbedaan nilai anak antara masyarakat pantai dengan masyarakat pedalaman. Juga adanya perbedaan tipe keluarga, kemungkinan di daerah pantai keluarga inti lebih menonjol, sedangkan di daerah pedalaman keluarga luas mungkin masih dominan.

**Tabel 2.1.**  
**Jumlah, Penyebaran dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten**  
**Bangkalan, Tahun 2005**

No.	Kecamatan	uas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Orang)	Tingkat Kepadatan Penduduk (Orang/Km2)	Rata-rata Jumlah Anggota RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kamal	41,40	46.900	1.132	4,4
2.	Labang	35,23	35.460	1.006	4,7
3.	Kwanyar	47,81	44.440	929	4,9
4.	Modung	78,79	47.812	606	4,6
5.	Blega	92,82	57.501	619	4,7
6.	Konang	81,09	44.063	543	4,8
7.	Galis	120,56	72.446	601	6,6
8.	Tanah Merah	68,56	59.333	865	4,4
9.	Tragah	39,58	26.184	661	4,8
10.	Socah	53,82	55.493	1.031	4,5
11.	Bangkalan	35,02	70.469	2.012	4,5
12.	Burneh	66,10	57.149	864	6,4
13.	Arosbaya	42,46	41.202	970	4,7
14.	Geger	123,31	63.028	511	4,5
15.	Kokop	125,75	63.422	504	6,8
16.	Tanjung Bumi	67,49	48.303	715	5,0
17.	Sepulu	73,25	42.938	586	4,2
18.	Klamps	67,10	50.416	751	3,7
	Jumlah	1260,14	926.559	735	4,8

Sumber : BPS Kab. Bangkalan, Hasil Registrasi Penduduk Akhir Bangkalan

Catatan : Data tahun 2000    Luas wilayah                    = 1.260,14 km<sup>2</sup>  
    Jumlah penduduk            = 762.090 orang  
    Tk. Kepadatan                = 604 orang/ km<sup>2</sup>  
    ata2 ART                      = 4,3

*Struktur penduduk dan perubahan selama 10 tahun terakhir*

Transisi demografi adalah perubahan struktur penduduk yang terjadi dalam jangka relatif lama, biasanya terjadi perubahan dari struktur penduduk muda ke arah struktur penduduk dewasa. Transisi demografi terjadi karena adanya kecenderungan penurunan tingkat kelahiran sebagai dampak keberhasilan program penurunan tingkat kelahiran oleh pemerintah. Transisi tersebut juga sebagai akibat dari penurunan tingkat kematian sebagai dampak dari keberhasilan program kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh

pemerintah. Faktor migrasi juga berpengaruh terhadap struktur penduduk utamanya pada kelompok usia kerja atau usia produktif. Sebab umumnya migrasi diikuti oleh kelompok penduduk usia kerja. Perubahan struktur demografi yang mengarah ke struktur penduduk dewasa tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah dan proporsi penduduk muda, namun meningkatkan jumlah dan proporsi penduduk dewasa dan tua. Secara ekonomis menurunnya penduduk muda mengurangi tingkat beban ketergantungan yang berasal dari kelompok usia muda besar. Namun di lain pihak perubahan struktur penduduk tersebut juga meningkatkan tingkat beban ketergantungan kelompok penduduk tua. Apabila dua kelompok penduduk tersebut digabung menjadi kelompok penduduk yang tergantung dengan penduduk usia kerja masih menunjukkan arah yang baik, yaitu terjadi penurunan tingkat beban ketergantungan (Ananta, Evi Nurvidya dan Chotib, 1994; Spengler & Duncan, 1956; Pressat, tanpa tahun). Perubahan struktur penduduk tersebut juga meningkatkan jumlah dan proporsi penduduk usia kerja secara langsung juga akan meningkatkan jumlah dan proporsi angkatan kerja. Dalam pembahasan berikut berhubung data komposisi menurut umur Kabupaten Bangkalan tahun 1990 tidak tersedia, maka hanya akan menggunakan data komposisi menurut umur tahun 1995, 2000 dan 2005. Sehingga gambaran perubahan struktur umur untuk Kabupaten Bangkalan hanya dapat dikaji selama 10 tahun terakhir.

Struktur penduduk Kabupaten Bangkalan sampai tahun 2005 masih menunjukkan struktur penduduk muda. Sekitar 30 persen penduduknya masih berusia di bawah 15 tahun. Namun dari data tahun 1995 sampai tahun 2005 memang ada sedikit kecenderungan adanya perubahan struktur penduduk di kabupaten ini, di mana penduduk usia mudanya sudah mengalami penurunan. Penurunan tersebut agak mencolok pada usia di bawah 5 tahun. Ini berarti bahwa penurunan tingkat kelahiran pada tahun 2000-an cukup nyata. Hal ini seperti telah diungkap di atas sangat terkait dengan keberhasilan program keluarga berencana. Menurut informan dari Kantor Keluarga Berencana dan Sejahtera bahwa meskipun ada kebijakan otonomi daerah yang mengharuskan daerah kabupaten membiayai pembangunannya sendiri, namun kegiatan program keluarga berencana masih tetap berjalan. Hal ini yang menghasilkan adanya penurunan kelahiran selama 5 tahun terakhir. Hanya untuk kabupaten Bangkalan penurunan ini agak lambat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya atau setingkat Provinsi Jawa Timur. Secara umum dapat dikatakan bahwa perubahan struktur kependudukan utamanya struktur umur sudah mulai nampak. Arah perubahan struktur penduduk muda ke arah struktur penduduk dewasa sudah mulai nampak. Perubahan struktur umur dan penambahan penduduk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk usia kerjanya.

Perubahan penduduk usia kerja tersebut secara kuantitatif juga akan berpengaruh terhadap angkatan kerjanya.

Perubahan struktur penduduk menurut umur dari struktur penduduk muda ke arah dewasa juga berpengaruh positif terhadap membaiknya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan adalah rasio antara kelompok penduduk dalam usia belum produktif (di bawah 15 tahun) dan sudah tidak produktif lagi secara ekonomis (60 tahun ke atas) dengan kelompok penduduk usia produktif (15-59 tahun). Di Bangkalan, angka beban ketergantungan selama 15 tahun terakhir sudah mengalami perbaikan dari angka 74,5 persen tahun 1995 menjadi 64,7 persen pada tahun 2005. Ini berarti angka beban ketergantungan di kabupaten ini secara teoritis makin ringan. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa ada perubahan jumlah dan persentase penduduk menurut kelompok umur. Ada kecenderungan penduduk usia di bawah 10 tahun sudah mengalami penurunan. Sementara penduduk usia 10 – 59 tahun dan 60 tahun ke atas mengalami peningkatan. Tabel 2.3 lebih nampak lagi memperlihatkan adanya perubahan jumlah dan pertumbuhan antara kelompok muda (di bawah 15 tahun), dewasa (15 – 59 tahun) dan tua (60 tahun ke atas). Secara absolut semua kelompok umur tersebut mengalami pertambahan selama 15 tahun terakhir, namun laju pertumbuhannya berbeda-beda dan menunjukkan gambaran yang menarik. Ada indikasi yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kelahiran selama 15 tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan ini, yaitu laju pertumbuhan penduduk umur di bawah 15 tahun selama 1995 – 2005 ternyata hanya 0,36 persen per tahun. Ini berarti selama kurun waktu tersebut telah terjadi penurunan angka kelahiran yang berarti. Sementara laju pertumbuhan pada kelompok 15 – 59 tahun (penduduk usia kerja) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 2 persen per tahun. Peningkatan penduduk usia kerja tersebut, di samping karena akibat tingginya tingkat fertilitas 10-15 tahun yang lalu, juga karena adanya faktor migrasi masuk.

Kemudian yang menarik lagi ternyata laju pertumbuhan kelompok lansia (60 tahun ke atas) sangat tinggi 4,8 persen/ tahun. Ini menunjukkan bahwa selama ini dan di masa mendatang masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan masih perlu menjadi perhatian yang serius, karena adanya peningkatan penduduk usia kerja yang cukup mencolok. Hal itu berarti juga peningkatan jumlah angkatan kerja yang memerlukan pasar kerja. Juga meningkatnya jumlah lansia juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

**Tabel 2.2.**  
**Komposisi Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Bangkalan,**  
**Jawa Timur, Tahun 1995, 2000 dan 2005**

Kelompok Umur	1995		2000		2005	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	87.647	12,1	87.335	11,1	69.562	7,5
5-9	96.339	13,3	112.728	14,3	105.138	11,3
10-14	82.576	11,4	91.174	11,6	106.805	11,5
15-19	75.333	10,4	72.103	9,2	79.764	8,6
20-24	63.743	8,8	56.643	7,2	72.172	7,8
25-29	58.672	8,1	64.130	8,1	76.737	8,3
30-34	43.460	6,0	55.696	7,1	78.920	8,5
35-39	44.185	6,1	51.375	6,5	55.121	5,9
40-44	42.012	5,8	40.549	5,1	58.592	6,3
45-49	36.217	5,0	37.199	4,7	62.406	6,7
50-54	31.871	4,4	36.058	4,6	45.919	5,0
55-59	21.006	2,9	25.403	3,2	31.487	3,4
60 +	41.288	5,7	57.035	7,2	83.936	9,0
JUMLAH	724.349	100,0	787.428	100,0	926.559	100,0

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 1995, 2000 dan 2005.

Catatan : Jumlah penduduk usia kerja tahun 1995 = 457.787 orang (63,2 %), tahun 2000 = 496.191 orang (63,0 %) dan tahun 2005 = 645.054 orang (69,7 %).

**Tabel 2.3.**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Laju Pertumbuhannya**  
**di Kabupaten Bangkalan, Tahun 1995 – 2005**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 1995	Jumlah Penduduk 2000	Jumlah Penduduk 2005	Laju Pertumbuhan Per tahun (1995-2005)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 – 14	266.562	291.237	281.505	0,36
15 -59	416.499	439.156	561.118	2,00
60 +	41.288	57.035	83.936	4,80
JUMLAH	724.349	787.428	926.559	1,7

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 1995, 2000 dan 2005.

## 2.2. Pertumbuhan penduduk dan Angkatan Kerja

Di atas telah dikemukakan bahwa ada pengaruh jumlah dan struktur penduduk tersebut terhadap penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Kemudian dilihat laju pertumbuhannya juga menunjukkan ada pengaruhnya. Tabel 2.4 menunjukkan bahwa ternyata ada pengaruh besarnya laju pertumbuhan penduduk secara umum terhadap pertumbuhan penduduk usia kerja dan pertumbuhan angkatan kerja. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 1995 – 2000 laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan per tahun hanya 1,7 persen. Sementara laju pertumbuhan penduduk usia kerja hanya mencapai 1,6 persen dan laju angkatan kerja hanya 1,5 persen. Namun dalam periode berikutnya (2000-2005) tatkala laju pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 3,3 persen, laju pertumbuhan kelompok penduduk usia kerja meningkat lebih tajam lagi menjadi 5,4 persen per tahun dan laju pertumbuhan angkatan kerja menjadi 4,7 persen.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Penduduk dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan,**  
**Provinsi Jawa Timur, Tahun 1995, 2000 dan 2005.**

Uraian	1995	2000	2005	Laju Pertumbuhan (%/ tahun)	
				1995-2000	2000-2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Jumlah Penduduk	724.349	787.428	926.559	1,7	3,3
2. Penduduk Usia Kerja (15 +)	457.787	496.191	645.054	1,6	5,4
3. Jumlah Angkatan Kerja	358.403	386.080	488.022	1,5	4,7

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 1995, 2000 dan 2005.

### *Karakteristik angkatan kerja*

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang berusia produktif yang bekerja dan mencari kerja. Sebagai bagian dari jumlah penduduk, maka besarnya jumlah angkatan kerja tergantung pada besarnya jumlah penduduk. Dalam hal ini, semakin besar jumlah penduduk maka jumlah angkatan kerja juga semakin besar. Besarnya jumlah angkatan kerja mencerminkan besarnya jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja untuk bekerja maupun mencari kerja, yang ditunjukkan oleh besarnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

**Tabel 2.5 :**  
**Struktur Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990,**  
**2000 dan 2004.**

Kegiatan	1990		2000		2004		Tingkat Pertumbuhan Per tahun	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	1990- 2000	2000- 2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Angkatan Kerja	301.154	54,9***	384.414	59,5***	368.885	51,2***	2,47	-1,03
Bekerja	291.017	(96,6)*	372.688	(96,9)	342.528	(92,9)	2,50	-2,08
Mencari Kerja	10.137	(3,4)**	11.726	(3,0)	26.357	(7,1)	1,47	22,44
Bukan Angkatan Kerja	247.073	45,1	261.196	40,5	352.115	48,8	0,56	7,75
Sekolah	77.561	(14,1)	87.423	(13,5)	119.166	(16,5)	1,20	8,05
Mengurus RT	119.444	(21,8)	110.733	(17,1)	165.232	(22,9)	-0,75	10,52
Lainnya	50.068	(9,1)	63.040	(9,8)	67.717	(9,4)	2,33	1,80
Jumlah	548.227	100	645.610	100	721.000	100	1,65	2,79

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004;

Note: Angka dalam kurung adalah persentase terhadap angkatan kerja

(-)\* adalah Tingkat Pekerja (Employment Rate)

(-)\*\* adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (Unemployment Rate)

\*\*\* adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

Selama periode 1990-2000, TPAK Kabupaten Bangkalan meningkat dari 54,9 persen pada tahun 1990 menjadi 59,5 persen pada tahun 2000 (Tabel 2.5). Salah satu penyebab meningkatnya partisipasi angkatan kerja di pasar kerja adalah karena adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dapat diketahui dari pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja selama periode 1990-2000 sebesar 2,50 persen lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja sebesar 2,47 persen.

Kemudian pada tahun 2004, TPAK Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan dari 59,5 persen menjadi 51,2 persen dengan pertumbuhan -1,03 persen. Penurunan TPAK ini disebabkan sebagian angkatan kerja keluar dari pasar kerja dan beralih pada kegiatan sekolah dan mengurus rumah tangga. Selama periode 2000-2004 laju pertumbuhan penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga yaitu 10,52 persen dan bersekolah 8,05 persen, lebih besar dari pertumbuhan penduduk yang masuk kelompok bukan angkatan kerja.

Mengenai karakteristik angkatan kerja yang telah bekerja menurut umur, sebagian besar berada pada usia 25 – 65 tahun. Ini disebabkan pada usia di bawah 25 tahun sebagian masih banyak yang masih menganggur atau mencari kerja dan sebagian yang lain masih duduk di bangku sekolah atau masih mengikuti pendidikan serta sebagian yang lain terutama perempuan

ada yang sudah menikah dan memilih kegiatan mengurus rumah tangga. Kemudian apabila dilihat kecenderungannya selama 14 tahun terakhir (1990 – 2004) ada perubahan komposisi menurut umur. Kelompok angkatan kerja yang berusia 10-24 tahun selama periode tersebut ada sedikit kecenderungan menurun. Ada dua kemungkinan terjadinya penurunan tersebut : Pertama, ada kecenderungan peningkatan angka partisipasi sekolah pada usia tersebut, sehingga usia 10-24 tahun yang memasuki pasar kerja cenderung menurun; Kedua, kelompok usia 10-24 tahun telah memasuki pasar kerja, namun mereka mendapatkan pekerjaan yang cocok sehingga masih bertahan untuk tetap menganggur.

**Tabel 2.6 :**  
**Karakteristik Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bangkalan Tahun 1990, 2000 dan 2004**

Kel. Umur/Tk Pendidikan (1)	1990 (2)	2000 (3)	2004 (4)
Kelompok Umur :			
10-14	2,43	1,57	0,83
15-19	6,65	7,69	6,50
20-24	10,28	9,82	8,57
25-29	13,90	10,63	11,57
30-34	13,04	12,96	12,23
35-39	12,15	14,36	12,88
40-44	9,45	14,31	11,26
45-64	28,39	25,47	29,82
65+	3,70	3,18	6,33
Jumlah (N)	100,00 (291.017)	100,00 (372.688)	100,00 (342.528)
Tingkat Pendidikan :			
Tidak Sekolah	76,56	61,17	49,0
SD	16,15	27,60	32,71
SMP	2,15	5,05	7,41
SMA	4,50	4,34	8,14
Diploma/PT	0,64	1,84	2,75
Jumlah (N)	100,00 (291.017)	100,00 (372.688)	100,00 (342.528)

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, Data diolah.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas angkatan kerja. Selain ketersediaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja juga dapat ditentukan oleh kualitas tenaga kerja. Pada Tabel 2.6 dapat diketahui tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan tergolong masih rendah, mayoritas angkatan kerja masih berpendidikan SD kebawah, terutama tidak dan belum tamat sekolah. Pada tahun 1990, sebanyak 92,71 persen tenaga kerja berpendidikan rendah SD kebawah kemudian mengalami penurunan menjadi 88,77 pada tahun 2000 dan 81,71

persen pada tahun 2004. Tingkat pendidikan tenaga kerja semakin kecil dengan semakin tinggi tingkat pendidikan namun ada peningkatan proporsi tenaga kerja pada masing-masing tingkat pendidikan SMP keatas. Tenaga kerja yang berpendidikan SMP meningkat cukup signifikan dari 2,15 (1990) menjadi 5,05 persen (2000) dan 7,14 persen (2004). Kemungkinan hal ini salah satunya disebabkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun.

Dunia pendidikan di Kabupaten Bangkalan tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) yang banyak terdapat di kabupaten ini terdiri dari ponpes tradisional dan modern. Secara umum, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di ponpes sangat besar karena ada nilai dalam masyarakat bahwa mereka yang keluar pesantren mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat. Besarnya minat sekolah pada pondok pesantren dapat dilihat dari perbandingan sekolah dari 1000 orang, 700 orang ke pesantren dan 300 ke sekolah umum (wawancara dgn Ketua Dewan Pendidikan). Meskipun sebagian besar merupakan Ponpes Salafi, yaitu pondok pesantren tradisional yang mengajarkan buku kuning dan tidak ada pelajaran umum, namun pada sebagian pesantren sudah mulai ada sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang mengajarkan kurikulum umum dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Hal ini mempermudah akses bagi siswa untuk meneruskan sekolah ke tingkat SMP dan SMA pada pesantren yang sama.

Akan tetapi kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat yang kurang mampu menyebabkan kemampuan untuk menyekolahkan anak menjadi terganggu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak anak-anak yang putus sekolah sampai tingkat SD atau SMP karena orang tua kurang mampu. Kebanyakan mereka yang putus sekolah langsung masuk ke pasar kerja sehingga ada suatu istilah 'untuk apa buang uang kalau bisa mencari uang'. Semboyan semacam ini didukung oleh ketersediaan lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang putus sekolah. Selama di pesantren, mereka dipersiapkan keahlian suatu bidang pekerjaan yang nantinya menjadi bekal mereka untuk masuk pasar kerja jika nanti keluar dari pesantren. Kelihatannya bagi masyarakat di Kabupaten Bangkalan, budaya kerja lebih besar dibanding untuk menyekolahkan anak sehingga aspirasi orang tua untuk menyekolahkan anak kelihatannya masih rendah. Hal ini merupakan salah satu alasan masih rendahnya kualitas tenaga kerja.

Selanjutnya proporsi tenaga kerja yang berpendidikan SMA mengalami peningkatan cukup besar dari tahun 2000 sebesar 4,34 persen menjadi 8,14 persen pada tahun 2004. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Disamping itu, peningkatan tingkat pendidikan tenaga kerja terutama yang berpendidikan SMA keatas juga dipengaruhi oleh

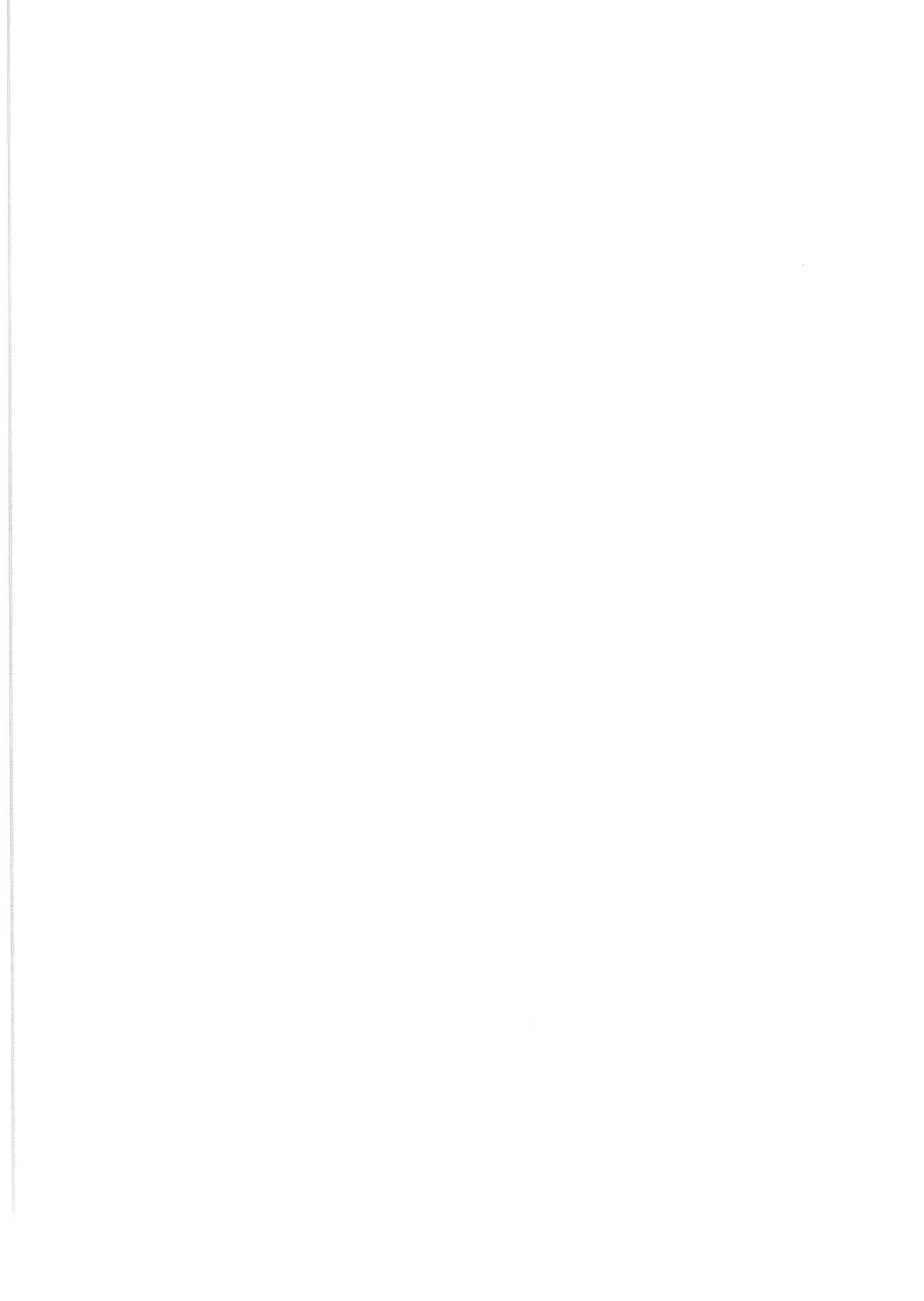
tuntutan pasar kerja. Pada beberapa jenis pekerjaan seperti pekerjaan di kapal, pekerjaan di industri-industri, mulai meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dalam perekrutan tenaga kerja baru dari SMP ke SMA. Menurut salah seorang narasumber 'sekarang kerja di kapal sudah susah mereka maunya yang berpendidikan SMA'.

Tenaga kerja yang berpendidikan tinggi juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari 0,64 persen tahun 1990 menjadi 1,84 persen tahun 2000 dan 2,75 persen pada tahun 2004. Keberadaan perguruan tinggi Universitas Trunojoyo dengan beberapa fakultasnya seperti Fakultas Pertanian, Teknologi Informasi, Hukum dan Ekonomi ikut berperan dalam meningkatkan tingkat pendidikan tinggi masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

#### *Pola perubahan angkatan kerja bekerja dan mencari kerja*

Angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan selama periode 1990-2000 dengan pertumbuhan 2,5 persen. Tingkat penyerapan tenaga kerja (*employment rate*) yaitu angkatan kerja yang bekerja dibandingkan jumlah angkatan kerja, meningkat dari 96,6 persen menjadi 96,9 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut penambahan angkatan kerja yang masuk pasar kerja dapat diserap oleh kesempatan kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu menciptakan kesempatan kerja baru bagi pencari kerja. Hal ini dapat diketahui dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (*unemployment rate*) dari 3,4 persen menjadi 3,0 persen (Tabel 2.5).

Kondisi yang sedikit menggembirakan tentang perubahan *employment rate* dan *unemployment rate* pada periode 1990-2000 tersebut, ternyata tidak bertahan lama dan tidak dapat berlanjut pada periode 2000-2004. Kondisi pada periode tersebut telah berbalik, di mana *employment rate* mengalami penurunan (dari 96,9 persen ke 92,9 persen), sementara *unemployment rate* (tingkat pengangguran) justru mengalami peningkatan yang cukup tajam (dari 3 persen ke 7,1 persen). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan telah terjadi penurunan kesempatan kerja. Akibatnya banyak angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja menjadi penganggur, sementara jumlah pencari kerja semakin meningkat. Para pencari kerja tersebut adalah mereka yang sedang mencari kerja ditambah mereka yang kehilangan pekerjaannya dan sekarang mencari kerja lagi. Kondisi ketenagakerjaan ini membuktikan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Bangkalan belum pulihnya kembali dalam 5 tahun terakhir, sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.



# BAB III

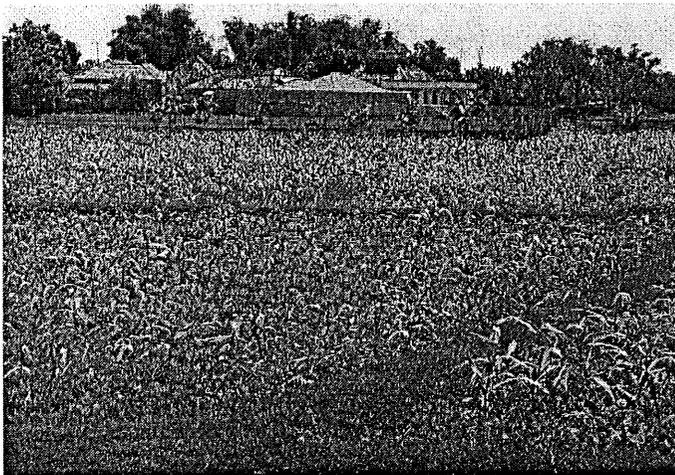
## PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA

### 3..1. Pertumbuhan Perekonomian

Sebelum membahas tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan, terlebih dahulu disajikan tentang potensi wilayah daerah tersebut. Hal ini penting dikemukakan untuk melihat apakah sektor unggulan yang dikembangkan di kabupaten tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sedangkan potensi yang disajikan dalam bagian ini meliputi potensi pertanian tanaman pangan, kehutanan, pertanian tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri dan pariwisata.

#### *a. Pertanian tanaman pangan*

Luas lahan tanaman padi di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2005 sebanyak 42.633 hektar. Jumlah produksi dalam tahun tersebut mencapai 193.511,19 ton gabah kering. Produktivitas lahan per hektar sebesar 45,39 kwintal atau 4,5 ton (Dinas Pertanian & Peternakan Kab. Bangkalan, 2005). Luas lahan untuk jagung tahun 2005 lebih luas mencapai 88.093 hektar. Jumlah produksinya pada tahun tersebut adalah 156.981,73 ton dan tingkat produktivitasnya hanya 17,82 kwintal atau 1,8 ton. Luas lahan untuk ubi kayu tahun 2005 sebanyak 4.814 hektar. Produksinya dalam tahun tersebut mencapai 56.178,75 ton dan produktivitasnya.



Gambar 2 : Pertanian tanaman pangan Daerah Bangkalan

b. *Pertanian tanaman perkebunan*

Luas lahan perkebunan kelapa rakyat tahun 2005 mencapai 7.913,35 hektar. Jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 4.135,30 ton dan produktivitas lahan mencapai 1 380,38 kg atau 1,38 ton per hektar. Luas lahan jambu mete sebanyak 7.105,4 hektar, Jumlah produksi pada tahun 2005 sebanyak 1.747,25 ton dan rata-rata produksi 839,27 kg/ hektar atau 8,39 kwintal. Luas lahan tembakau mencapai 32 hektar, jumlah produksi pada tahun 2005 sebanyak 20,48 ton serta rata-rata produksi 6,4 kwintal per hektar. Luas lahan cengkeh pada tahun 2005 hanya seluas 2,47 hektar, jumlah produksi per tahun 0,55 ton dan rata-rata produksi per hektar 6,26 kwintal (Kantor Perkebunan Kab. Bangkalan, 2005).

c. *Perikanan – jenis perikanan, kawasan, produksi*

Potensi perikanan laut di wilayah Bangkalan memang cukup besar mengingat sebagai besar wilayah perbatasan kabupaten tersebut adalah laut. Jumlah nelayan tangkap di daerah tersebut pada tahun 2005 sebanyak 5.253 orang. Sementara nelayan budidaya adalah tambak 1.281 orang, perairan 56 orang, tambak sawah 37 dan kolam 21 orang. Nilai produksi perikanan laut tahun 2005 mencapai sekitar Rp 19.381.661.000,00 dan perikanan budidaya ada sekitar Rp 19.435.847.000,00 (Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Bangkalan, 2005).

d. *Peternakan – jenis ternak, wilayah penggembalaan*

Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Bangkalan merupakan lahan kering, ada sebagian lahan yang dapat digunakan untuk lahan penggembalaan hewan. Di lahan pertanian tanaman pangan di musim kemarau juga dapat digunakan untuk lahan penggebalan. Namun sayang luas lahan tersebut tidak tersedia datanya. Namun jumlah ternak yang diusahakan rakyat dapat diketahui. Jumlah kuda di Kabupaten Bangkalan tahun 2005 adalah 890 ekor, sapi cukup banyak 134.107 ekor, kerbau 1.942 ekor, kambing 61.102 ekor dan domba 3.834 ekor. Sapi merupakan jenis ternak yang terbanyak dan disukai penduduk sehubungan dengan perannya, kecuali sebagai tenaga membajak lahan dan tenaga penarik gerobak, juga sebagai pelestari budaya yang berupa *karapan sapi*. Karapan sapi merupakan adat lomba pacuan sapi yang masih terus dilestarikan dan merupakan karakteristik tradisi di Bangkalan. Oleh karena itu, banyak warga masyarakat yang memelihara sapi jenis unggul yang dapat diadu dalam karapan. Jenis unggas yang banyak diusahakan adalah ayam kampung (1.396.767 ekor), ayam ras

(108.995 ekor), Itik (68.979 ekor) dan menthok/ itik manila (17.866 ekor). Produksi daging pada tahun 2005 adalah daging sapi 2.162,66 ton, kerbau 15 ton, kambing 417,84 ton, domba 3,34 ton, ayam kampung 2.073,93 ton dan telornya 1.205.41 ton (Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bangkalan, 2005).

e. *Pertambangan*

Potensi tambang yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan merupakan pertambangan galian C. Tambang tersebut adalah batu gamping, dolomit, fosfat, lempung, pasir kuarsa dan batu pasir. Cadangan batuan tersebut adalah batu gamping di Kecamatan Kamal diperkirakan 150.000 m<sup>2</sup>, Labang 220.000 m<sup>2</sup>, Tragah 210.000 m<sup>2</sup>, Galis 52.980.000 m<sup>2</sup>, Kwanyar 335.000 m<sup>2</sup>, Konang 194.000 m<sup>2</sup>, Modung 370.000 m<sup>2</sup> Blega 550.000 m<sup>2</sup> dan Geger 150.965.000 m<sup>2</sup>. Batuan dolomit terdapat di Kecamatan Kamal sekitar 2.083.000 m<sup>2</sup>, Labang 1.450.000 m<sup>2</sup>, Kwanyar 710.000 m<sup>2</sup> dan Tragah 500.000 m<sup>2</sup>. Batuan fosfat terdapat di Kecamatan Labang sekitar 300.000 m<sup>2</sup>, Kwanyar 500 m<sup>2</sup>, Modung 288.000 m<sup>2</sup>, Blega 330.000 m<sup>2</sup> dan Tragah 115.000 m<sup>2</sup>. Batuan lempung terdapat di Kecamatan Tragah sekitar 500.000 m<sup>2</sup>, Galis 1.000.000 m<sup>2</sup>, Lempung Konang 2.335.000 m<sup>2</sup>, Modung 135.000 m<sup>2</sup>, Blega 225.000 dan Geger 2.610.000 m<sup>2</sup>. Batu pasir terdapat di Kecamatan Galis sekitar 30.000 m<sup>2</sup> dan Geger 300.000 m<sup>2</sup>. Batuan kalsit terdapat di Kecamatan Modung 40.000 m<sup>2</sup> dan Blega 45.000 m<sup>2</sup>. Sementara pasir kuarsa hanya terdapat di Kecamatan Galih sekitar 400.000 m<sup>2</sup> (Kantor Pertambangan & Energi Kab. Bangkalan, 2005)

f. *Industri*

Potensi untuk pengembangan industri di Kabupaten Bangkalan masih sangat memungkinkan. Sebagian besar industri saat ini adalah industri kerajinan rumah tangga, jenis industrinya antara lain industri batik, industri makanan, industri anyam-anyaman, industri meubel dan industri jamu. Bahan baku utamanya menggunakan potensi lokal. Pada tahun 2005 industri kerajinan rumah tangga telah mencapai 16.511 unit perusahaan dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 24.470 orang. Sementara industri kecil pada tahun yang sama sebanyak 419 unit dan menyerap tenaga kerja 3.505 orang. Industri besar sedang di daerah ini belum berkembang, sampai tahun 2005 hanya sebanyak 18 unit dan hanya menyerap tenaga kerja 325 orang (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Bangkalan, 2005)



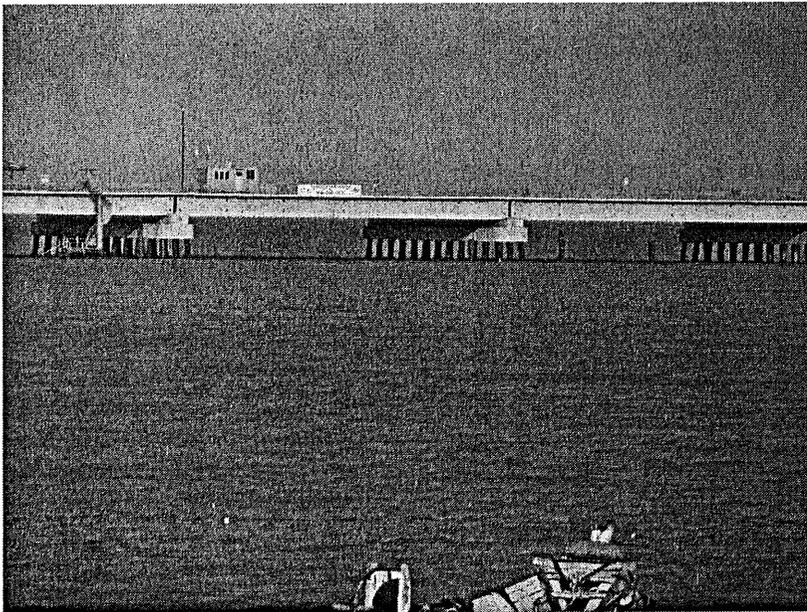
Gambar 3 : Hasil Industri Kerajinan Batik Khas Madura di Bangkalan

g. *Pariwisata*

Objek wisata di Kabupaten Bangkalan adalah wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam berupa objek wisata pantai sebab di daerah ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dan sebagian merupakan pantai pasir putih. Sementara wisata budaya yang ada adalah museum kerajaan Bangkalan dan adanya tradisi karapan sapi yang diselenggarakan setiap tahun. Tradisi karapan sapi ini biasa menyedot para turis dari luar kabupaten. Kegiatan ini biasanya diselenggarakan di stadion Kota Bangkalan. Di samping ada lagi objek kerajinan batik tradisional di Kecamatan Tanjung Bumi yang terkenal dengan kerajinan batik khas madura.

Rencana strategi (Renstra) suatu daerah merupakan penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) yang disertai oleh Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), dengan demikian mempunyai unsur penting terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Renstra Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategi bagi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan muatan lokal, antara lain aspek Geografis, Demografis, Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia (Renstra Kabupaten Bangkalan Tahun 2003-2007).

Hingga saat ini, permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bangkalan terutama dalam proses pencapaian program pembangunan daerah antara lain : Pertama, belum selesainya jembatan SURAMADU yang direncanakan menghubungkan Jawa (Surabaya) – Madura secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan jasa serta mobilitas penduduk. Kedua, masih rendahnya pelayanan kesehatan dan sarana lainnya bagi kesejahteraan sosial. Ketiga, rendahnya kualitas SDM yang ada di lembaga pemerintah daerah. Ketiga masalah tersebut masih ada beberapa masalah yang belum tertangani berkaitan dengan kualitas pelayanan masyarakat.



Gambar 4 : Jembatan SUROMADU direncanakan tahun 2008 selesai

Lokasi wilayah Bangkalan sangat dekat dengan Kota Surabaya, sehingga akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Bangkalan, mengungkapkan bahwa pembangunan Jembatan Surabaya-Madura pada hakekatnya membuka pintu masuk bagi arus barang dan modal dari Jawa ke Madura dan sebaliknya. Madura sebagai sebuah pulau yang terpisah dari Pulau Jawa, seolah-olah merupakan wilayah terisolasi dari dunia keramaian, namun sebentar lagi akan menjadi kawasan baru untuk pengembangan industri ke depan. Pengembangan industri tersebut akan merubah struktur ekonomi Madura dari ekonomi berbasis pertanian tradisional menjadi ekonomi berbasis industri manufaktur.

Mencermati rencana industrialisasi Madura, semakin jelas tergambar dari konsep pembangunan yang dianut Pemerintah. Pemerintah Daerah mengadopsi kebijakan negara-negara berkembang pada umumnya yang dikenal dengan pembangunan negara liberal (Mandiri, 2006). Hal tersebut sangat beralasan bila kebijakan ini menjadi pilihan pemerintah. Ekologi pertanian tegalan di Madura telah menghasilkan sistem sosial di mana penduduk tidak biasa bekerjasama, sehingga *revolusi biru* dan *revolusi hijau* tidak terjadi di Madura. Pada gilirannya nanti, semua ini tidak hanya akan mengubah wajah Madura secara drastis. Karakter masyarakat industri akan berbeda dengan masyarakat agraris. Masyarakat industri cenderung berfikir lebih rasional, berorientasi pada masa depan dan berperilaku seperti halnya masyarakat modern, sehingga sangat beralasan bila ada kekawatiran karakter masyarakat akan berubah. Upaya membuka Madura sebagai "*lahan industri baru*" akan menjadikan Madura dapat dikembangkan sebagai sebuah Pulau Samudera, pemukiman dan pariwisata serta sebagai pusat industrialisasi Indonesia bagian timur dengan pelabuhan ekspor terbesar setelah Jakarta dan Surabaya.

Sarana dan prasarana yang ada di Kota Bangkalan relatif sudah tersedia dan tertata dengan baik, terutama Kawasan Pemerintahan Pemda berupa lingkungan pemerintahan kabupaten telah memberi suasana dinamika pembangunan di wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi masyarakat, seperti penjualan hasil pertanian di pasar, perkotaan juga sudah berjalan dengan baik, kesibukan perniagaan terjadi setiap hari sejak pagi hingga petang hari, pada malam hari banyak orang berjualan makanan sepanjang jalan raya. Demikian pula mobilitas ulang alik penduduk terjadi antara Bangkalan dan sekitarnya dengan Kota Surabaya, ditandai dengan banyaknya orang yang bekerja di Surabaya, sebaliknya ada warga Surabaya yang bekerja di Bangkalan atau Madura. Sarana perumahan cukup tersedia dan tertata serta teratur rapi, bahkan ada beberapa rumah yang menonjol dan sangat bagus

bangunannya, sehingga secara keseluruhan tidak terlihat rumah yang terkesan kumuh.

### 3.2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Potensi ekonomi yang dapat diharapkan bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan adalah : (1). pertanian (*horticultura*); (2). pertambangan; (3). peternakan dan perkebunan; dan (4). perikanan laut. Ke empat sektor ekonomi tersebut oleh pemerintah daerah ditargetkan sebagai sektor unggulan (Bappeda, Kab. Bangkalan, 2006). Apabila dibandingkan dengan wilayah yang sudah maju tingkat ekonominya, maka faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya taraf hidup penduduk di suatu daerah adalah terbatasnya sumber daya manusia. Penyebab rendahnya pemanfaatan sumber daya manusia adalah karena tingkat pengangguran penuh dan tingkat pengangguran terselubung relatif tinggi. Mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberi definisi bahwa pengangguran terbuka adalah orang yang mampu bekerja akan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, sedangkan pengangguran terselubung adalah orang yang menganggur dalam kapasitas di bawah optimal (BPS, 2000). Di lain pihak permasalahan tenaga kerja adalah karena diakibatkan masalah sosial. Adanya perbedaan latar belakang sosial budaya, akan berpengaruh dalam menilai jenis pekerjaan, sehingga dapat menimbulkan segmentasi pekerjaan.

Analisis struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan dapat digunakan sebagai indikator penting untuk melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Bangkalan. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan, dengan masih tingginya sumbangan terhadap PDRB daerah. Walaupun selama periode tahun 2002-2005 sumbangan sektor pertanian tersebut ada kecenderungan mulai menurun. Berdasarkan data pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian atas dasar harga konstan terhadap PDRB, sebesar 41,8 persen (tahun 2002) telah menurun menjadi 38,40 persen (tahun 2005). Rendahnya sumbangan sektor pertanian tersebut disebabkan karena ada sedikit penurunan sumbangan dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebaliknya sektor lain di luar pertanian sumbangan terhadap PDRB sedikit mengalami peningkatan, antara lain : sektor pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air minum; konstruksi dan bangunan; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor jasa tidak mengalami perubahan yang berarti. Dari data tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir sektor yang dapat menyumbang peningkatan PDRB adalah sektor yang ditunjang oleh pengadaan sarana dan prasarana ekonomi, seperti perbaikan jalan, perumahan dan sarana infrastruktur lainnya. Sebaliknya sektor

pertanian dan jasa masih belum bisa diharapkan untuk menyumbang peningkatan PDRB.

Perkembangan yang terjadi selama lima tahun terakhir ini (2002-2005) setelah krisis, kesuburan tanah tidak lagi dapat diandalkan, dan telah terjadi perubahan fungsi untuk kegiatan non pertanian, seperti pemukiman, sarana jalan, dan ada kecenderungan menjadi lahan industri. Hasil wawancara dengan beberapa informan menyebutkan bahwa jembatan SUROMADU yang direncanakan menghubungkan Surabaya – Madura sangat diharapkan lekas selesai. Dampak dari pembangunan jembatan tersebut kemungkinan akan mendorong berkembangnya sektor non pertanian, terutama sektor industri dan sektor pertambangan. Perubahan yang terjadi adalah akan merubah sebagian lahan pertanian menjadi lahan untuk industri

Sebagai gambaran umum, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2002 hingga tahun 2004 terjadi peningkatan sebesar 4,4 persen per tahun. Kemudian dari tahun 2002 sampai 2004 telah terjadi peningkatan menjadi 4,7 persen (Bangkalan Dalam Angka, 2005). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penurunan sumbangan sektor pertanian, sebagai akibat turunnya sumbangan dari subtanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sedangkan sumbangan sektor lainnya, kecuali sektor jasa mengalami peningkatan. Sektor jasa mengalami penurunan disebabkan oleh rendahnya sumbangan dari subsektor pemerintahan dan swasta. Angka-angka tersebut memberi gambaran bahwa selain sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi di daerah tersebut, nampaknya sektor industri pengolahan dan perdagangan akan menuju menjadi basis ekonomi setempat. Gambaran ini nampak tidak sesuai dengan program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang dalam pembangunan ekonominya lebih menitikberatkan pada 4 sektor unggulan, yaitu : (1). Pertanian (*horticultura*), (2). Perindustrian dan Pariwisata, (3). Peternakan dan Perkebunan, dan (4). Perikanan laut.

**Tabel 3.1 :**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan**  
**(Atas Dasar Harga Konstan 2000), Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2002-2005**  
**(Persen)**

Lapangan Usaha	Tahun			
	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	41.84	40.49	39.46	38.48
a. T bahan makanan	31.95	31.00	30.09	29.39
b. T perkebunan	1.37	1.33	1.29	1.25
c. Peternakan	4.22	3.86	3.80	3.65
d. Kehutanan	1.39	1.46	1.48	1.46
e. Perikanan	2.91	2.83	2.80	2.74
2. Pertambangan & Penggalian	0.40	0.54	0.57	0.64
3. Industri pengolahan	3.76	3.73	3.77	3.78
4. Listrik, gas & air bersih	0.97	1.16	1.44	1.57
5. Konstruksi / Bangunan	4.94	5.79	6.61	7.13
6. Perdag, hotel & restoran	22.68	22.73	22.40	22.36
7. Angkutan & komunikasi	10.22	10.26	10.43	10.66
8. Keu, persewaan & Jasa pers	4.16	4.21	4.30	4.43
9. Jasa lainnya	11.03	11.08	11.02	10.95
Jumlah : Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
Absolut (000 Rp)	2.003.147	2.085.885	2.181.453	2.284.043

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bangkalan 2002-2005

### 3.3. Perkembangan investasi dan iklim usaha

Agar sektor industri menjadi sektor andalan dalam perolehan devisa pada suatu wilayah, maka diperlukan banyak faktor yang saling kait mengkait. Dalam hal ini sektor industri harus memiliki keunggulan dalam produksi dan faktor produksi, terutama tenaga kerja, infrastruktur dan pasar hasil produksi (Wiranta, 1996). Ke empat faktor tersebut harus bisa bekerja secara efisien dan saling mendukung untuk menghasilkan produk yang kompetitif di pasar global. Di samping itu, sektor pemerintahan dan swasta perlu segera digalakkan untuk menghidupkan perekonomian daerah.

Jenis industri di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2003 dibedakan dalam tiga jenis industri utama, yaitu industri kecil, aneka industri dan industri dasar (Tabel 4.2). Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat

tiga jenis industri. Industri yang dapat menyerap tenaga kerja paling banyak adalah usaha industri kecil. Jumlah industri kecil di Bangkalan nampaknya cukup menggembirakan, yaitu 934 unit usaha atau 98 persen dari seluruh industri dan dapat menyerap 2.299 orang tenaga kerja atau 59 persen dari seluruh industri yang ada. Sedangkan nilai investasi di usaha industri kecil tersebut hampir mencapai Rp.4,5 milyar atau hanya sebesar 8,6 persen dari seluruh investasi yang ditanam di sektor industri. Namun nilai produksinya dapat mencapai Rp 15,4 milyar atau sebesar 50 persen dari total nilai produksi di bidang industri.

Angka – angka tersebut bila dibandingkan dengan jenis industri lainnya, sangat berbeda. Jumlah jenis usaha aneka industri, sebanyak 17 unit atau 1,8 persen, jauh di bawah industri kecil, tetapi dapat menyerap tenaga kerja sebesar 1.532 orang atau 40 persen. Akan tetapi nilai investasi yang ditanamkan jauh lebih besar dari pada industri kecil yaitu sebesar Rp. 47,6 milyar atau tiga kali lipat nilai investasi industri kecil. Namun nilai produksinya berada di bawah industri kecil, yaitu hanya sebesar Rp.15,1 milyar atau 49 persen.

Meskipun peluang investasi di Kabupaten Bangkalan ada di 4 sektor unggulan, yaitu : pertanian, tambang, peternakan dan perkebunan, serta perikanan laut, tetapi dalam kenyataannya selama ini masing-masing sektor tersebut belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, perlu mendorong untuk menarik para investor agar dapat memperbesar peluang usaha di wilayah tersebut. Sebagai gambaran makro dapat dilihat dari jumlah industri baik industri besar (dasar), industri (aneka industri) dan industri kecil yang terdapat di Kabupaten Bangkalan. Untuk memberikan gambaran investasi dan jenis industri serta tenaga kerja yang terserap dapat dilihat dari Tabel 3.2.2 berikut.

**Tabel 3.2 :**  
**Jumlah Industri Menurut Jenis Usaha, Tenaga kerja dan Investasi**  
**Kabupaten Bangkalan, Tahun 2005**

Jenis Industri	Juml. Unit Usaha	Jumlah Tenagakerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Industri Kecil :	<b>934(98)</b>	<b>2.299 (59)</b>	<b>4.491.393 (8,6)</b>	<b>15.409.767 (50)</b>
- Pangan	- 485	- 1.091	- 1.865.874	- 6.613.000
- Sandang/Kulit	- 33	- 63	- 46.500	- 156.000
- Bahan Bangunan	- 155	- 551	- 1.000.630	- 5.182.117
- Kerajinan Alam	- 99	- 143	- 114.500	- 188.300
- Logam	- 162	- 451	- 1.463.889	- 3.270.350
Aneka Industri :	<b>17 (1,8)</b>	<b>1.532 (40)</b>	<b>47.680.380 (91)</b>	<b>15.157.410 (49)</b>
- Tepung Kaolin	- 13	- 1.373	- 45.450.000	- 14.949.210
- Penglh. Pasir Kwarsa	- 1	- 21	- 967.000	-
- Cold Storage	- 3	- 138	- 1.263.380	- 208.200
Industri Dasar :	<b>2 (0,2)</b>	<b>17 (1)</b>	<b>169.000 (0,4)</b>	<b>227.000 (1)</b>
- Oksigen	- 1	- 13	- 144.000	-
- Galangan Kapal	- 1	- 4	- 25.000	- 227.000
Jumlah	<b>953 (100%)</b>	<b>3.848 (100%)</b>	<b>52.340.773 (100%)</b>	<b>30.794.177 (100%)</b>

Sumber : BPS, Bangkalan Dalam Angka 2005

Data (Tabel 3.2) menunjukkan bahwa usaha industri kecil di Kabupaten Bangkalan lebih cenderung *padat karya* (artinya lebih banyak menyerap tenaga kerja) dibanding jenis usaha aneka industri dan industri dasar yang sifatnya cenderung padat modal. Bahkan apabila dibandingkan antara ketiga jenis industri tersebut, maka baik jumlah tenaga kerja yang terserap dan nilai hasil produksi industri kecil jauh lebih besar. Tingginya jumlah tenaga kerja yang bisa terserap di usaha industri kecil tersebut, kemungkinan industri yang sedang dikembangkan di Kabupaten Bangkalan lebih bersifat *labor intensif* atau padat tenaga kerja. Artinya bahwa industri yang ada merupakan bagian dari kebijakan pemerintah, agar perekonomian yang ada lebih mementingkan penyerapan tenaga kerja.

Industri kecil atau disebut dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tumbuh di Bangkalan merupakan salah satu bagian penting bagi perekonomian suatu daerah, sehingga memberikan arti penting kesadaran terhadap keberadaan UKM di daerah tersebut. Hal yang mendasari

pentingnya keberadaan UKM, Berry dkk (dalam Wahyudi,H 2004) menyebutkan bahwa : pertama, kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamika ekonomi, UKM sering mencapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Tabel 2.2, telah membuktikan bahwa UKM yang merupakan usaha kecil dan usaha rumah tangga di Bangkalan telah menunjukkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.

Tumbuhnya UKM di Bangkalan, merupakan salah satu upaya masyarakat untuk menghadapi krisis, dengan demikian secara langsung dapat mengatasi pengangguran di daerah tersebut. Kondisi seperti ini, sangat jelas bahwa produk-produk UKM di Bangkalan, adalah menjadi bahan baku bagi produk usaha besar (aneka industri) atau langsung masuk ke pasar di luar daerah. Dengan demikian UKM mempunyai keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja dan mampu mennggulangi krisis ekonomi.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa UKM (Industri Kecil) dapat mengatasi problem ketenagakerjaan dan terutama masalah pengangguran. Analisis tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara industri kecil dan aneka industri serta kemungkinan saling melengkapi. Sehingga ini merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk memberdayakan UKM di daerah tersebut yang sekaligus dapat membuka lapangan kerja dan membutuhkan unit usaha yang banyak, tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang besar.

Perkembangan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang terserap Perusahaan Milik Dalam Negeri dapat di lihat pada Tabel 3.3 dan Perusahaan Milik Asing pada Tabel 3.4. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan jumlah investasi yang ditanamkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini disebabkan bahwa investasi yang ditanamkan lebih bersifat padat modal. Artinya semakin besar modal yang ditanamkan tidak akan berpengaruh langsung terhadap tenaga kerja yang diserap pada perusahaan tersebut.

**Tabel: 3.3 :**  
**Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Tenagakerja PMDN**  
**Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 – 2005**

No	Tahun	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2002	15.000.000.000,-	767	1
2	2003	129.761.710.000,-	149	4
3	2004	14.178.550.000,-	296	12
4	2005	41.280.630.000,-	172	8

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Kab.Bangkalan, 2005

**Tabel: 3.4 :**  
**Perkembangan Nilai Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja PMA**  
**Kabupaten Bangkalan Tahun 2002 – 2005**

No	Tahun	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2002	-	-	-
2	2003	967.500.000,-	6	3
3	2004	1.040.000.000,-	15	5
4	2005	3.708.055.543,-	39	13

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, Kab.Bangkalan, 2005

Dari kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas investor yang masuk ke Bangkalan masih didominasi investasi dalam negeri, dibandingkan dengan investasi Asing. Demikian pula tenaga kerja yang dapat terserap dalam penanaman modal, masih didominasi oleh investor dari dalam negeri. Dengan kata lain masuknya investasi baik dalam maupun luar negeri belum berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja.

#### *Perkembangan sarana dan prasarana ekonomi*

Pembangunan wilayah daerah Madura perlu memperhatikan keragaman perkembangan ekonomi wilayah baik secara administratif kewilayahan dengan 4 (empat) wilayah kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) maupun keragaman sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan perkembangan infrastruktur masing-masing wilayah, maka diperlukan “Strategi Pengembangan Terpadu Kawasan Madura dan Kepulauan” mengacu pada upaya-upaya guna mengantisipasi peningkatan aksesibilitas wilayah dengan adanya “Pembangunan Jembatan Suramadu”. Namun demikian, pemilihan skenario kebijakan pembangunan wilayah tersebut sangat tergantung pada :

1. Dukungan dan komitmen bersama (*political will*) Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dalam upaya mengintegrasikan perencanaan tata ruang wilayahnya secara menyeluruh dan terpadu, sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal.
2. Peningkatan partisipasi aktif pelaku pembangunan (pemerintah kabupaten, dewan perwakilan rakyat daerah, pengusaha/swasta, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat) dalam bentuk dialog secara intensif dan berkesinambungan, sehingga mampu mewujudkan peran serta masing-masing pihak baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan wilayah.
3. Kemampuan mewujudkan keterbukaan dan konsistensi segenap pelaku pembangunan dalam konteks penerapan kebijakan pembangunan dan kerjasama antar pemerintah kabupaten, sehingga diharapkan mampu meminimalisasikan konflik kepentingan (*conflict interest*) yang mungkin terjadi di masa mendatang. (Lembaga Mandiri, Bangkalan, 2006).

Perkembangan lima tahun terakhir 2002 – 2005 berdasarkan data pada Tabel 3.5, menunjukkan bahwa proyek sarana perhubungan dan sarana ekonomi di Kabupaten Bangkalan rata-rata meningkat lima kali, dengan anggaran sebesar Rp. 2,9 miliar menjadi 3,9 milyar. Melihat besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk sebuah kabupaten relatif masih rendah, akan tetapi jumlah tenaga kerja yang bisa diserap dalam proyek tersebut cukup menggembirakan, yaitu dari 141.000 orang menjadi 395.760 orang, jadi hampir 3 kali lipat.

**Tabel 3.5 :**  
**Proyek Pembangunan Sarana Sosial Ekonomi dan Jumlah Tenagakerja yang**  
**Terserap di Kabupaten Bangkalan,**  
**Tahun 2002 - 2004**

No	Bidang	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sarana Perhubungan	172	192	197	877
2	Sarana Sosial/ekonomi	206	226	254	1.092
3	APBD (ribuan rp)	2.903.500,-	2.185.343,-	2.800.000,-	3.958.150,-
4	Swadaya Tenaga Kerja	141.000	149.580	126.900	395.760

*Sumber : Bangkalan Dalam Angka, 2005*

Perkembangan sarana jalan selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari pajang jalan menurut permukaan dan kondisi jalan yang di gambarkan pada Tabel 3.6. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa panjang jalan keseluruhan selama lima tahun terakhir bertambah 66.000 km, dan panjang jalan yang di aspal telah bertambah , yang semula 76 persen ( 2002) menjadi 80 persen (2005) berarti mengalami perubahan yang cukup berarti. Akan tetapi dilihat dari kondisi jalan nampak bahwa kondisi jalan yang baik baru mencapai 44,5 persen (2002) menjadi 57,3 persen (2005), artinya bahwa pembangunan sarana jalan tidak diimbangi oleh perbaikan kondisi jalan secara benar, sehingga belum 100 persen kondisi jalan adalah baik.

**Tabel 3.6 :**  
**Panjang jalan menurut jenis dan kondisi**  
**di Kabupaten Bangkalan, Tahun 2002 dan 2005**

No	Keadaan	2000 (km)	2005 (km)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukaan : 1. Diaspal 2. Kerikil 3. Tanah	470.210 89.850 58.450	552.450 82.050 50.220
2	Kondisi Jalan : 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak 4. Rusak Berat	301.350 195.580 79.980 99.400	392.170 160.280 7.670 124.600

*Sumber: Bangkalan Dalam Angka, 2000; 2005*

Demikian pula jenis angkutan darat di Kabupaten Bangkalan selama sepuluh tahun terakhir (1995 – 2005) menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Yang cukup menarik adalah jumlah bus telah meningkat 19 kali dari 22 (tahun 1995) menjadi 420 (tahun 2005), ini menunjukkan bahwa sarana angkutan umum telah berkembang dengan pesat. Kondisi ini akan berdampak terhadap peningkatan mobilitas penduduk di Kabupaten Bangkalan. Selain itu sarana angkutan barang juga berkembang dengan cepat seperti jenis truk dan pickup. Jumlah oplet cenderung mengalami penurunan, ini barang kali disebabkan sebagian besar masyarakat telah menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor ataupun mobil pribadi yang tidak terekam dalam statistik.

**Tabel 3.7 :**  
**Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 1995, 2000 dan 2005**

No	Jenis Angkutan	1995	2000	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bus	22	140	420
2	Truk	659	764	794
3	Oplet	1.192	1004	1102
4	Pickup	806	1212	2.000

Sumber : *Bangkalan Dalam Angka, 2000; 2005*



Gambar 5 : Sarana dan prasarana perhubungan darat di Kota Bangkalan

Pesatnya perkembangan sarana dan prasarana jalan di Kabupaten Bangkalan tersebut, berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian penduduk setempat serta penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut dan sektor-sektor yang terkait. Salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian di suatu daerah adalah jumlah lalulintas pos yang digunakan untuk sarana pengiriman surat dan wesel uang di daerah tersebut.

Selam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.7 bahwa pengiriman surat pos mengalami penurunan tajam dari 7,9 juta (tahun 2000) menjadi 17,2 ribu (tahun 2005), ini berarti terjadi penurunan secara fantastik. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan telepon seluler yang telah perambah didaerah tersebut. Dilihat dari assesibilitas dan kelancaran berita melalui telepon selular jauh lebih cepat dari pada harus dikirim melalui pos. Selama 6 tahun terakhir (2000-2005) yang pengiriman paket pos juga mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat, demikian pula pengiriman wesel pos juga mengalami peningkatan sebesar 72 persen, dan uang yang diweselkan meningkat dua kali lipat dari Rp. 3,8 milyar (2000) menjadi Rp. 7,4 milyar (2005) atau meningkat dua kali lipat.

**Tabel 3.8 :**  
**Jumlah Lalu Lintas Pos di Kabupaten Bangkalan,**  
**Tahun 2000, 2005**

No	Pengiriman	2000	2005
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengiriman Surat Pos	7.915.352	17.216
2	Pengiriman Paket Pos	3.965	8.224
3	Pengiriman Wesel Pos	17.156	23.683
4	Uang Yang diweselkan (Rp)	3.899.780.000	7.426.500.000
5	Penabung Tabanas (orang)	79.395	81.241
6	Uang yang Ditabung (Rp)	10.338.097.000	14.264.000.000
7	Penerima pensiun (orang)	88.759	2963
8	Uang Pensiunan (Rp)	34.366.480.000	38.917.500.000

Sumber: *Bangkalan Dalam Angka, 2000; 2005*

Jumlah penabung juga mengalami peningkatan tajam dari 79.395 orang ( tahun 2000) menjadi 81.241 orang (tahun 2005) dan jumlah uang yang ditabung juga mengalami peningkatan tajam dari Rp. 10,3 milyar (tahun 2002) menjadi Rp. 14,2 milyar (tahun 2005). Dari jumlah orang yang menabung dan jumlah uang yang ditabung menunjukkan bahwa sifat gemar menabung di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi. Secara tidak langsung juga

merupakan modal masyarakat yang dapat dimobilisir untuk mengembangkan pengembangan kesempatan kerja.

### *Perubahan Sosial Budaya*

Kabupaten Bangkalan adalah suatu daerah otonom yang memiliki tiga sektor lapangan pekerjaan utama yang tampaknya mendominasi pasar kerja sebagaimana disebutkan dalam subbab di atas. Lokasi ini juga merupakan daerah otonom yang memiliki pelabuhan laut dan terminal angkutan darat, serta pasar yang berlangsung sepanjang hari. Pelabuhan laut ini merupakan pelabuhan penambangan utama yang menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura.

Kondisi sosial masyarakat memang selalu ditunjukkan dengan satuan lokalitas dan sentimen sosial masyarakat Madura yang kuat. Namun demikian, sebagai suatu langkah untuk melihat latar belakang terbentuknya struktur pendidikan, struktur pekerjaan, struktur kelas penghasilan, dan struktur penampilan individual pekerja, maka bentuk satuan lokalitas dan sentimen sosial yang ada tampaknya sangat penting untuk diungkapkan.

Satuan lokalitas yang dimaksud dalam studi ini adalah kondisi sosial kawasan Kabupaten Bangkalan, khususnya, dan masyarakat Pulau Madura umumnya. Orang Madura memang berbeda dengan penduduk Jawa Timur lainnya. Ada dua tipe orang Madura yang ada di Jawa Timur. Pertama adalah mereka yang bermukim di Pulau Madura. Kedua adalah mereka yang bertempat tinggal di pesisir pantai utara Jawa Timur bagian timur. Perbedaan yang paling kentara adalah pola mobilitasnya. Mereka yang disebut pertama memiliki kebiasaan merantau yang kuat. Sementara mereka yang termasuk ke dalam kelompok kedua memiliki kecenderungan untuk menetap. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumberdaya alamnya yang memang berbeda sama sekali. Orang Madura di Pulau Madura paling besar menghasilkan garam. Sedangkan mereka yang di pesisir Jawa Timur bertani secara menetap. Artinya, kondisi sosial ini meliputi uraian tentang wilayah sosial. Kondisi fisik, seperti posisi geografis dan kondisi topografis memang cukup penting, namun demikian, relevansinya dirasakan kurang kuat untuk ditelaah dalam studi ini. Tampaknya, persepsi narasumber terhadap lintasan terbentuknya Kabupaten Bangkalan adalah gambaran empiris dari kondisi sosial kawasan yang paling erat kaitannya dengan stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan aktifitas kegiatan ekonomi.

Sentimen sosial masyarakat adalah berbagai gambaran mengenai komunitas masyarakat di Kabupaten Bangkalan yang berkaitan dengan stratifikasi sosial masyarakat, mobilitas sosial, dan aktifitas kegiatan

ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bangkalan hanya menampilkan suatu gambaran umum yang langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau pekerjaan penduduknya. Pekerjaan penduduk ini merupakan unsur utama variabel kondisi satuan lokalitas dalam lingkup kajian *mobilitas pekerja* di Kabupaten Bangkalan.

Namun demikian, secara umum, besarnya penyerapan pekerja pada jenis-jenis pekerjaan utama tidak dapat dipungkiri sebagai konsekuensi logis dari satuan lokalitas perkotaan dan perdesaan. Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa kemasyarakatan merupakan sejarah kegiatan penduduk Kabupaten Bangkalan. Artinya, perkembangan kegiatan masyarakat Kabupaten Bangkalan memang tidak dapat dilepaskan dari jenis-jenis kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, dan tenaga usaha penjualan.

Uraian mengenai etos kerja masyarakat Kabupaten Bangkalan ini merupakan analisis penting yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan, etnis dan agama. Latar belakang pendidikan merupakan faktor yang dapat membentuk karakter individu anggota masyarakat. Pendidikan juga merupakan indikator kelas sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Sama halnya dengan latar belakang etnis yang dimiliki oleh seseorang anggota masyarakat. Faktor ini merupakan indikator kelas sosialnya dalam suatu komunitas sosial tertentu. Demikian juga dengan latar belakang agama seseorang, adalah faktor yang menunjukkan bahwa seseorang anggota masyarakat berada dalam suatu komunitas sosial tertentu. Ketiga faktor tersebut pada gilirannya memberikan indikator pada tinggi rendahnya etos kerja yang dimiliki seseorang anggota masyarakat.

Tingkat pendidikan formal penduduk di Kabupaten Bangkalan, secara umum masih tergolong rendah. Kebanyakan hanya tamat Sekolah Dasar, bahkan masih lebih banyak yang hanya pernah mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Dasar tetapi tidak tamat. Sedangkan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan tampak kecil. Pada penduduk laki-laki yang tidak/belum tamat SD/MI sedikit lebih besar dari pada penduduk perempuan. Sementara itu, penduduk perempuan yang tamat SD/MI tampak lebih besar dari pada penduduk laki-laki (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2004; hal: 25). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan pendidikan pada masyarakat dan angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan berada pada kelas sosial yang rendah. Dengan demikian, jenis-jenis pekerjaan sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, serta tenaga usaha penjualan, merupakan jenis pekerjaan yang paling sesuai.

Mobilitas sosial angkatan kerja dalam melintasi batas-batas sosial religi dan etnis tampaknya tidak mungkin terjadi. Mobilitas sosial yang besar kemungkinannya untuk terlaksana, adalah memperbesar sentimen keagamaannya atau sentimen etnisitasnya pada setiap pekerjaan yang mereka geluti. Hal ini dapat terjadi dengan upaya, antara lain dengan memperbanyak silaturahmi dan pertemuan-pertemuan sosial. Hal ini sangat mereka junjung tinggi, karena setidaknya dapat memperkecil terjadinya budaya carok.

Gambaran mobilitas penduduk (*mobilitas horisontal – geographical mobility*) akan lebih banyak menerangkan faktor terpenting yang menyebabkan mobilitas tersebut berlangsung. Secara umum, mobilitas penduduk selalu diartikan sebagai suatu perjalanan orang perorang dari suatu tempat ke tempat lain. Namun demikian, bukan berarti pengertian mobilitas penduduk yang lain harus diabaikan. Pengertian yang lain dari mobilitas penduduk dapat juga sebagai suatu perjalanan karir pekerjaan seseorang dari peringkat bawah ke peringkat lebih tinggi (*mobilitas vertikal – social mobility*).

Gambaran kesehatan penduduk Bangkalan tampaknya cukup baik. Berbagai akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan tersedia dengan cukup memadai. Sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan cukup memadai untuk menanggulangi masalah kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Sebanyak 22 Puskesmas tersebar di Kabupaten Bangkalan. Sementara itu terdapat 69 Puskesmas Pembantu di 69 desa di Kabupaten Bangkalan, tampaknya cukup memadai untuk melayani kesehatan masyarakat. Balai Pengobatan ada 6 buah. Terdapat sebanyak 24 Puskesmas Keliling, 4 buah Puskesmas Andalan, 1033 Posyandu, 145 buah Polindes, tampaknya sudah lebih dari cukup bagi penduduk Kabupaten Bangkalan untuk mendapat predikat sehat. Dari 22 orang dokter yang membuka praktek swasta, dan 184 orang bidan yang juga membuka praktek secara swasta, menunjukkan bahwa akses kesehatan masyarakat Kabupaten Bangkalan terbilang tinggi.

Gambaran ini diperkuat dengan perkembangan kesadaran ibu-ibu hamil untuk melahirkan bayinya melalui pertolongan bidan atau tenaga medis, dibandingkan dukun bayi. Pada tahun 2004 mereka yang melahirkan melalui bidan atau tenaga medis lebih besar dari pada dukun. Sedangkan pada tahun yang lalu kondisi ini masih terbalik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya mereka lebih memilih bidan atau tenaga medis, ketimbang dukun bayi. Hal ini juga didukung oleh semakin banyaknya bidan-bidan muda yang masuk ke Kabupaten Bangkalan (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2004; hal: 20). Data yang lebih bermakna menunjukkan bahwa 45,7 persen penduduk Kabupaten Bangkalan jika sakit berobat ke Puskesmas/Puskesmas Pembantu; 28,5 persen berobat ke dokter praktek

swasta; dan 16,5 persen pergi ke pada praktek petugas kesehatan (Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan Tahun 2004; hal: 21). Dari sekitar 91 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang ada di Kabupaten Bangkalan, terdapat 34 orang dokter; 235 Bidan Desa; dan 147 Perawat pada tahun 2004. Angka-angka ini tampaknya naik dari data tahun 2003.

Masyarakat Madura yang ada di Kabupaten Bangkalan sebenarnya terkenal dengan masyarakat pemeluk agama Islam yang sangat religius. Meskipun tidak ada data yang menggambarkan perbandingan rasio murid dengan sekolah antara sekolah dasar dengan madrasah ibtidaiyah, sekolah lanjutan tingkat pertama dengan madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan dengan madrasah alliyah, tampaknya pada umumnya peserta didik di kabupaten ini mengenyam kedua jenis sarana pendidikan tersebut secara bersamaan. Setidaknya, bila mereka bersekolah pada kelembagaan kependidikan atau sekolah pada satu waktu tertentu, mereka juga bersekolah atau mengaji pada kelembagaan kependidikan keagamaan. Suatu hal yang wajar, karena kelembagaan kependidikan keagamaan, baik itu madrasah swasta maupun pondok pesantren, tidak pernah mengenakan tarif. Dapat dikatakan 95 persen bebas biaya pendidikan. Untuk menghadapi era industri di kabupaten ini apabila jembatan SUROMADU terealisasi nampaknya perlu disiapkan angkatan kerja ke arah era tersebut. Fasilitas-fasilitas pendidikan kejuruan yang sesuai dengan era industri tersebut perlu ditingkatkan.

## **BAB IV**

# **PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENGANGGURAN**

Kesempatan kerja dalam kenyataannya adalah sama dengan penyerapan tenaga kerja, sebab jumlah kesempatan kerja yang tersedia sama dengan jumlah angkatan kerja yang terserap. Apabila jumlah angkatan kerja yang tersedia tidak terserap semua dalam kesempatan kerja yang ada, maka sisa angkatan kerja tersebut disebut dengan angkatan kerja penganggur atau disebut sebagai penganggur. Dengan perkataan lain penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai jumlah angkatan kerja yang bekerja atau terserap dalam kesempatan kerja yang tersedia. Dalam bagian ini membahas tentang peta penyerapan tenaga kerja yang dilihat dari di sektor-sektor/ lapangan kerja mana saja mereka terserap dan juga dinamikanya selama 14 tahun terakhir. Kemudian apa status pekerjaan dan tingkat pendidikan para tenaga kerja tersebut? Dalam membahas tentang pengangguran dianalisis karakteristik penganggur yang meliputi jumlah penganggur menurut umur dan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Bagian terakhir dibahas tentang setengah penganggur yang berdasarkan pada jumlah jam kerja per minggu.

### **4.1. Penyerapan Tenaga Kerja**

#### *Lapangan kerja*

Kesempatan kerja yang tersedia dapat dilihat dari banyaknya penyerapan angkatan kerja oleh sektor-sektor ekonomi. Dalam suatu perekonomian terdapat 9 sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa. Secara umum, jumlah kesempatan kerja di Kabupaten Bangkalan relatif sedikit. Sektor perindustrian tidak ada dan sektor ekonomi lainnya kurang berkembang. Hal ini menyebabkan banyak angkatan kerja yang bekerja di luar seperti Surabaya, Jakarta bahkan ke luar negeri sebagai TKI.

Sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan. Selain kontribusinya terhadap perekonomian, sektor ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar angkatan kerja. Pada tahun 1990 lebih dari 60 persen angkatan kerja terserap

di sektor dan meningkat menjadi 68 persen pada tahun 2000. Kemungkinan hal ini masih terkait dengan krisis ekonomi tahun 1997 di mana pertanian adalah sektor ekonomi yang mampu bertahan dan menjadi penyelamat bagi angkatan kerja yang kehilangan pekerjaan akibat dampak krisis. Selanjutnya pada tahun 2004 penyerapan angkatan kerja di sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 61 persen (Tabel 4.1).

Meskipun tanahnya relatif kurang subur karena mayoritas lahan adalah lahan kering (70 persen) namun sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian yaitu pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Komoditi pertanian yang dikembangkan disesuaikan dengan kondisi lahan, yaitu tanaman padi, jagung, kacang, palawija, ubi kayu dan sebagainya. Padi ditanam pada lahan irigasi dan tadah hujan, sementara tanaman jagung dapat ditanam pada lahan kering dan tadah hujan. Jagung merupakan komoditi unggulan dengan jenis jagung varietas lokal. Menanam jagung merupakan pekerjaan tradisional masyarakat. Menurut informasi, dulu bahan makanan masyarakat Bangkalan adalah jagung campur beras. Namun sekarang telah berubah menjadi hanya mengkonsumsi beras saja, sedangkan jagung hanya digunakan sebagai pakan ternak.

Pekerjaan pada sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dilakukan oleh masyarakat lokal dan pendatang. Bagi sebagian masyarakat lokal, bekerja sebagai petani bukan satu satunya pekerjaan yang dilakukan. Biasanya setelah musim tanam mereka pergi ke Surabaya untuk bekerja pada sektor informal seperti berdagang atau buruh bangunan dan mereka akan kembali pada saat musim panen. Sementara tenaga kerja pendatang, kebanyakan berasal dari Jember dan Banyuwangi, datang pada saat panen selama 1-2 minggu untuk menjadi buruh upahan. Biasanya mereka telah memiliki hubungan kerja dengan pemilik lahan sawah yang relatif lebih luas.

**Tabel 4.1 :**  
**Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 1990, 2000 dan 2004.**

Lapangan Pekerjaan (1)	1990 (2)	2000 (3)	2004 (4)
Pertanian	60,39	68,00	60,79
Pertambangan dan penggalian	1,02	0,41	0,66
Industri	7,75	5,92	4,42
Listrik, Gas dan Air	0,04	0,00	0,08
Konstruksi	2,79	3,84	3,45
Perdagangan	14,85	8,62	12,76
Transportasi	3,60	5,41	7,84
Keuangan	0,19	0,40	0,40
Jasa	9,37	7,41	9,59
Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah (N)	100,00 (291.017)	100,00 (372.688)	100,00 (342.528)

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, Diolah dari data BPS.

Sektor yang mampu menyerap angkatan kerja cukup besar selain pertanian adalah sektor perdagangan. Pada tahun 1990 proporsi angkatan kerja bekerja di sektor perdagangan sebesar 14,85 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 8,62 persen tahun 2000 dan 12,76 persen pada tahun 2004. Selama periode 1990-2000 tersebut terjadi pergeseran persentase angkatan kerja dari sektor perdagangan ke sektor pertanian. Hal ini kemungkinan terkait dengan kondisi ekonomi akibat krisis ekonomi tahun 1997. Mereka yang tidak mampu bertahan disektor perdagangan beralih bekerja di sektor pertanian. Sektor perdagangan terutama perdagangan kecil merupakan salah satu sektor yang mudah dimasuki atau ditinggalkan angkatan kerja. Menurut informasi, tipikal pekerjaan orang Bangkalan adalah sebagai pedagang

Sektor jasa merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar setelah sektor perdagangan. Meskipun pada tahun 2000 terjadi penurunan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa namun tahun 2004 proporsi tenaga kerja di sektor ini kembali meningkat. Penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa pemerintahan di Kabupaten Bangkalan cukup tinggi. Menurut salah seorang informan, pada saat ini jumlah tenaga honorer pada kantor-kantor dinas di Bangkalan sudah semakin banyak karena setiap tahun direkrut tenaga honorer. Salah seorang informan menggambarkan tenaga honorer sebagai '*pegawai yang tidak punya meja*'. Menjadi tenaga honorer kelihatannya merupakan kesempatan kerja yang dapat diharapkan oleh tenaga kerja yang berpendidikan tinggi karena sempitnya lapangan pekerjaan untuk mereka. Pada tabel 3.5 dapat diketahui ada peningkatan tingkat pendidikan tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa selama periode 1990-2004. Untuk mereka yang berpendidikan SMA peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2000-2004 dari 14,76 persen menjadi 23,92 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan Diploma dan Perguruan Tinggi meningkat dari 2 persen pada tahun 1990 menjadi 7,52 persen tahun 2000 dan 8,71 persen pada tahun 2004. Berbeda dengan tenaga guru, pada saat ini Kabupaten Bangkalan kekurangan tenaga guru sebanyak 1.300 orang.

Sempitnya kesempatan kerja di Kabupaten Bangkalan menyebabkan mobilitas tenaga kerja keluar semakin besar. Menjadi TKI di luar negeri merupakan salah satu solusi permasalahan terbatasnya kesempatan kerja di Kabupaten Bangkalan. Pada umumnya mereka ke luar negeri sebagai TKI ilegal yang diberangkatkan melalui calo. Meskipun sebagai daerah pengirim TKI tetapi tidak ada perusahaan penerah tenaga kerja atau PJTKI di Bangkalan. PJTKI yang dulu pernah ada kalah bersaing dengan calo sehingga tidak ada data mengenai jumlah TKI dari Bangkalan. Besarnya jumlah TKI dapat dilihat pada saat mereka dipulangkan dari Malaysia atau Arab Saudi. Pada tahun 2002 sebanyak 11.000 orang TKI dipulangkan dari

Malaysia (Disnaker, Kab, Bangkalan). Selain menjadi TKI keluar negeri, mobilitas tenaga kerja juga dilakukan ke daerah lain seperti Surabaya. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah pada tenaga kerja yang kebanyakan berusia produktif bisa bekerja di sektor informal, seperti buruh bangunan, pedagang dan sebagainya.

Jenis pekerjaan yang juga banyak diminati kaum muda adalah bekerja di pelayaran yaitu sebagai buruh pada kapal barang atau kapal pesiar. Kebanyakan mereka yang bekerja di kapal berasal dari Kecamatan Arosbaya. Mereka yang bekerja di pelayaran kebanyakan masih ada hubungan famili karena mereka saling menarik dan membawa anggora keluarga lain atau saudara lain untuk bekerja di pelayaran. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan di kapal relatif lebih besar dan dapat meningkatkan status ekonomi dalam masyarakat. Berdasarkan observasi, mereka yang bekerja di kapal memiliki rumah bagus karena penghasilan mereka kebanyakan digunakan untuk membangun rumah yang tergolong mewah. Menurut informasi, sekarang untuk dapat bekerja di kapal semakin sulit karena di samping harus menyediakan uang sebesar Rp. 50 juta, juga disyaratkan pendidikan minimal SMA yang dulunya hanya SMP bisa masuk.

Sektor transportasi merupakan sektor yang cukup potensial dalam menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu 3,6 persen pada tahun 1990, menjadi 5,4 persen pada tahun 2000 dan 7,84 pada tahun 2004. Keberadaan pelabuhan penyeberangan di Kamal sangat berperan dalam menyediakan berbagai lapangan pekerjaan baik di sektor perdagangan, jasa maupun transportasi bagi sejumlah tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan.

Sektor industri merupakan sektor ekonomi yang cukup berperan dalam menyerap tenaga kerja. Namun ada kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor industri. dari 7,75 persen tahun 1990 menjadi 5,92 tahun 2000 dan 4,42 pada tahun 2004. Industri yang cukup berkembang di Kabupaten Bangkalan adalah industri kecil dan rumah tangga. Oleh karena itu, industri yang banyak menyerap tenaga kerja adalah industri kecil dan rumah tangga, seperti Industri Batik, Industri Meubel, Industri Ukiran, Industri Agel, Industri Makanan dan lain-lain. Industri besar kurang berkembang di Kabupaten Bangkalan dan jumlahnya relatif sedikit. Industri tersebut merupakan industri padat modal yang menyerap tenaga relatif sedikit.

Pada tahun 2008 dengan selesainya Jembatan SURAMADU maka ditargetkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri dapat ditingkatkan dengan akan didirikannya sejumlah industri besar. Menurut pihak Bappeda, Kabupaten Bangkalan sangat cocok untuk dibangun industri karena lahannya

yang gersang dan letaknya yang strategis dan akses transportasi yang mudah. Pada saat ini, kota Surabaya sudah cukup padat dengan kawasan industrinya maka dengan adanya Jembatan SURAMADU, Madura khususnya Bangkalan dapat dijadikan sebagai kawasan industri baru. Pada saat ini sudah ada beberapa industri yang mulai dalam tahap perencanaan.

### *Status pekerjaan*

Analisis tentang status pekerjaan angkatan kerja dapat digunakan untuk menelusuri sifat pekerjaan pada sektor-sektor tertentu. Dalam status pekerjaan sebagai usaha sendiri, usaha dibantu buruh tidak tetap/ dibantu anggota rumah tangga dan pekerja tidak dibayar/ pekerja keluarga tanpa upah biasanya lebih banyak terdapat pada sektor-sektor yang tradisional. Sementara pada status berusaha dengan buruh tetap dan status buruh (termasuk didalamnya pegawai/ karyawan baik negeri maupun swasta) terdapat pada sektor-sektor yang modern (Manning, 1982 : 23). Di daerah yang perekonomiannya sudah semakin maju biasanya ditandai dengan makin berkurangnya proporsi angkatan kerja yang status pekerjaannya sebagai pekerja keluarga, usaha sendiri dan usaha dibantu buruh tidak tetap/ anggota keluarga. Sementara itu ada kecenderungan peningkatan proporsi angkatan kerja yang status pekerjaannya sebagai buruh/ karyawan dan usaha dengan buruh tetap (Daliyo, 1996).

Dalam subbab di atas telah diuraikan bahwa di Kabupaten Bangkalan selama 14 tahun terakhir telah terjadi adanya kecenderungan adanya transisi perekonomian dari sektor tradisional ke sektor yang dianggap modern, meskipun transisi tersebut belum begitu drastis. Dari analisis tentang status pekerjaan tenaga kerja ini ternyata juga memperlihatkan atau mencerminkan sudah terjadi adanya transisi perekonomian di Kabupaten Bangkalan dari sektor tradisional ke sektor yang lebih modern. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa ternyata proporsi tenaga kerja yang statusnya sebagai usaha sendiri, usaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga ada kecenderungan makin menurun. Sementara proporsi jumlah tenaga kerja yang statusnya sebagai buruh/ karyawan dan usaha dibantu buruh tetap ada kecenderungan makin meningkat. Dari hasil analisis data tersebut makin memperkuat fakta bahwa di Kabupaten Bangkalan sedang mengalami proses perubahan dalam perekonomian dan ketenagakerjaan selama 14 tahun terakhir. Meskipun proses perubahan tersebut belum begitu drastis. Perubahan tersebut mungkin akan nampak nyata nanti setelah jembatan SUROMADU telah selesai. Dengan selesainya jembatan tersebut diharapkan pengembangan sektor industri/ pengolahan dan jasa akan berkembang cukup besar. Hal akan terjadi setelah tahun 2008.

**Tabel 4.2 :**  
**Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 1990, 2000 dan 2004.**  
**(Persen)**

<b>Status Pekerjaan</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2004</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Usaha sendiri (tanpa bantuan orang lain)	27,76	18,90	19,42
Usaha sendiri dibantu buruh tidak tetap/ kel	29,72	27,38	21,93
Usaha sendiri dibantu buruh tetap	0,95	1,89	2,38
Buruh/Karyawan	15,94	15,60	29,04
Pekerja tak dibayar/ pekerja keluarga	25,63	36,22	27,24
Jumlah (N)	100,00 (290.489)	100,00 (372.688)	100,00 (342.528)

*Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, Diolah dari data BPS.*

### *Tingkat pendidikan angkatan kerja*

Pendidikan merupakan salah satu alat untuk mengukur kualitas angkatan kerja. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan kualitas angkatan kerja, peningkatan pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis. Karena mutu/ kualitas angkatan kerja dapat diukur dari tingkat pendidikannya, maka makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja harus diikuti dengan peningkatan produktivitas. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja juga ada kecenderungan memilih lapangan kerja/ sektor yang produktivitas tinggi atau penghasilannya tinggi. Sektor pertanian (Sektor A) sering dianggap sebagai sektor yang tingkat produktivitasnya rendah, sementara sektor M dan sektor S dianggap produktivitasnya lebih tinggi. Dalam hal ini wajar bila ada kecenderungan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi lebih memilih bekerja di sektor modern, yaitu sektor M (manufaktur/industri) dan sektor S (jasa)

Penelitian di Kabupaten Bangkalan juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan kaitan tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lapangan/ sektor pekerjaan yang dipilih. Ada kecenderungan makin tinggi pendidikan angkatan kerja makin banyak yang bekerja di sektor modern, terutama di sektor S dan M. Di sektor M kecenderungan tersebut belum begitu mencolok. Hal ini disebabkan belum semua sektor M tersebut merupakan sektor formal atau modern. Kebanyakan para angkatan kerja tersebut hanya bekerja di industri-industri rumah tangga yang jenis pekerjaannya tidak menuntut latar belakang pendidikan tinggi.

Perubahan angkatan kerja menurut pendidikannya dari tahun 1990 sampai tahun 2004, ada kecenderungan terus meningkat. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa proporsi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi makin meningkat, sedangkan yang berpendidikan rendah makin menurun. Selanjutnya juga ada kecenderungan yang berpendidikan tinggi makin tertarik ke sektor S atau sektor modern. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan.

**Tabel 4.3 :**  
**Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan-Pekerjaan dan Tk Pendidikan di Kabupaten Bangkalan, Tahun 1990, 2000 dan 2004.**

Tingkat Pendidikan	A			M			S		
	1990	2000	2004	1990	2000	2004	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tdk/Blm Tmt Sekolah	85,85	73,76	62,01	74,14	40,05	31,48	57,52	31,77	28,07
SD	12,99	23,86	35,16	20,54	41,05	48,71	21,13	33,00	23,32
SMP	0,84	2,09	2,56	1,98	7,86	11,27	5,06	12,95	15,96
SMA	0,26	0,19	0,27	2,96	9,76	7,58	14,29	14,76	23,92
Diploma/PT	0,06	0,10	0	0,37	1,28	0,96	2,00	7,52	8,71
Jumlah	100 (175.755)	100 (253.426)	100 (208.221)	100 (33.752)	100 (37.904)	100 (29.512)	100 (81.510)	100 (81.358)	100 (104.795)

Sumber: Sensus Penduduk 1990, 2000 dan Susenas 2004, Diolah dari data BPS.

## 4.2. Pengangguran angkatan kerja

Konsep penganggur dalam tulisan ini adalah angkatan kerja yang belum/ tidak bekerja atau mendapatkan pekerjaan dan masih berusaha untuk mencari pekerjaan selama seminggu terakhir. Sedangkan tingkat pengangguran (unemployment rate) adalah jumlah angkatan kerja yang sedang mencari kerja (penganggur) dibagi jumlah seluruh angkatan kerja dikalikan seratus. Makin meningkatnya jumlah penganggur terbuka atau pencari kerja dijumpai di Kabupaten Bangkalan. Jumlah pencari kerja pada tahun 1990 sebanyak 3,4 persen (10.137orang) dari jumlah angkatan kerja (301.154 orang) menurun menjadi 3,1 persen (11.726 orang) dari jumlah angkatan kerja sebesar 384.414 orang pada tahun 2000. Namun kemudian meningkat cukup drastis menjadi lebih dari dua kali lipat pada tahun 2004, yaitu mencapai 7,2 persen (26.357 orang) dari jumlah angkatan kerja sebanyak 368.885 orang. Meningkatnya proporsi mereka yang mencari pekerjaan tersebut merupakan indikator dari semakin tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan.

### *Penganggur menurut umur dan jenis kelamin*

Di Kabupaten Bangkalan penganggur atau pencari kerja didominasi oleh kelompok umur muda (15-29 tahun). Pada tahun 1990 jumlah penganggur umur 15-29 sebanyak 39,7 persen, mengalami penurunan menjadi 29,3 persen pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 41,3 persen pada tahun 2004. Salah satu sebab pokok tingginya penganggur adalah masuknya penganggur muda baru yang mencari pekerjaan untuk pertama kali. Selain itu besarnya arus migran masuk juga memiliki andil terjadinya jumlah penganggur yang besar. Persoalan penganggur merupakan salah satu penyebab penting dan mendasar untuk munculnya berbagai gejolak dan keresahan masyarakat. Meningkatnya berbagai tindakan kriminalitas terutama di perkotaan juga dapat disebabkan oleh semakin sulitnya mencari pekerjaan atau meningkatnya pengangguran.

**Tabel 4.4 :**  
**Penganggur/ Pencari Kerja Menurut Umur di Kabupaten Bangkalan**  
**1990, 2000 dan 2004**  
**(Persen)**

<b>Umur</b>	<b>1990</b>	<b>2000</b>	<b>2004</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 14	0,3	0,1	0,2
15 – 19	7,9	6,1	10,5
20 – 24	13,3	11,9	13,5
25 – 29	18,5	11,3	17,3
30 – 34	13,6	14,8	13,4
35 – 39	11,9	15,3	15,4
40 – 44	8,8	15,3	10,5
45 – 64	23,2	23,9	19,2
65 +	2,5	1,3	0
Jumlah	100,0	100,0	100,0
N	10.137	11.726	26.357

*Sumber: BPS, Kabupaten Bangkalan, Pengolahan Data Tape.*

Kelompok penduduk usia muda (15-29 tahun) mendominasi tingginya jumlah pencari kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencari kerja adalah penduduk muda yang baru keluar dari dunia pendidikan yang mulai memasuki dunia kerja. Tingginya penganggur di Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh persediaan angkatan kerja (*labour supply*) lebih banyak

daripada yang dibutuhkan (*labour demand*). Permintaan (pekerja terampil) kesempatan kerja lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Di samping adanya rintangan titik temu antara penganggur dengan pihak calon pemberi kerja, sehingga bisa terjadi penumpukan pencari kerja di wilayah tertentu, sementara di lain tempat pihak calon pemberi kerja mengalami kesulitan untuk mencari/memilih calon pekerja.

Di Kabupaten Bangkalan tingginya penganggur selain karena masuknya pencari kerja muda, juga disebabkan karena kurangnya kesempatan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja. Berdasarkan wawancara dengan pejabat setempat diperoleh keterangan bahwa meskipun tersedia lahan yang cukup luas, namun kondisi lahan di Bangkalan termasuk tanah tandus, berbatu dan lahan kering, sehingga lahan yang tersedia tidak produktif.

Setelah mencapai umur 30-44 tahun jumlah penganggur sedikit menurun, hal ini karena pada umumnya penganggur mulai berkeluarga dan karena desakan kebutuhan ekonomi maka tidak jarang orang menerima pekerjaan apa saja, walaupun tidak sesuai dengan pendidikannya. Hal yang cukup menarik untuk dicermati ternyata penganggur kelompok umur 45 tahun ke atas cukup besar persentasenya (sekitar 25 persen) baik kondisi tahun 1990, 2000 maupun 2004. Tingginya penganggur pada kelompok umur 45 tahun ke atas tersebut sangat besar kemungkinan mereka adalah pekerja serabutan di sektor informal yang pada saat Sensus Penduduk dilaksanakan mereka sedang tidak ada pekerjaan sehingga mereka sedang mencari-cari pekerjaan. Sementara penganggur berusia 10-14 tahun sangat kecil proporsinya karena pada kelompok umur tersebut seharusnya mereka masih di bangku sekolah.

Penganggur laki-laki ada kecenderungan meningkat sementara penganggur perempuan menurun. Bila pada tahun 1990 pencari kerja laki-laki sebesar 61,5 persen (3.903 orang) meningkat menjadi 75,5 persen (8.853 orang) pada tahun 2000 dan menjadi 77,3 persen (20.374 orang) pada tahun 2004. Meningkatnya pencari kerja laki-laki sebagai akibat makin terbatasnya kesempatan kerja dan sempitnya lahan pertanian yang ada. Selain lahan pertanian yang makin menyempit, terdapat kecenderungan pemuda yang semakin tidak tertarik bekerja di sektor pertanian. Kelompok muda lebih tertarik bekerja sebagai pegawai, baik pegawai negeri maupun swasta. Kondisi semacam ini tampaknya tidak hanya dijumpai di Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, pencari kerja perempuan juga mengalami penurunan, dari 38,5 persen (tahun 1990) menjadi 22,7 persen (tahun 2004). Namun, walaupun secara persentase menurun tetapi dilihat dari angka nominalnya menunjukkan kenaikan yang cukup berarti yaitu dari 3.903 orang menjadi 5.983 orang atau meningkat lebih dari satu setengah kali lipat.

Semakin meningkatnya jumlah pencari kerja perempuan menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran budaya masyarakat Kabupaten Bangkalan yaitu bahwa tidak hanya kaum laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga, tetapi perempuan perlu pula berpartisipasi. Hal lain yang berpengaruh pula pada meningkatnya pencari kerja perempuan karena semakin meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, sehingga dampak dari pendidikan yang meningkat tersebut menuntut mereka untuk mencari pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka.

**Tabel 4.5 :**  
**Penganggur/ Pencari Kerja Menurut Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Bangkalan**  
**1990, 2000 dan 2004**  
**(Persen)**

Jenis Kelamin	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	61,5	75,5	77,3
Perempuan	38,5	24,5	22,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0
N	10.137	11.726	26.357

*Sumber: Kabupaten Bangkalan, Pengolahan Data Tape*

#### *Pendidikan penganggur*

Tingkat pendidikan penganggur Kabupaten Bangkalan pada tahun 1990 sebesar 94 persen berpendidikan SD ke bawah. Sepuluh tahun kemudian, tahun 2000, ada kecenderungan menurun penganggur yang tingkat pendidikannya SD ke bawah yaitu sekitar 80 persen. Kondisi masih belum berubah, sekitar 80 persen pada tahun 2004. Kelompok penganggur berpendidikan SD dan kebawah penganggurannya lebih tinggi daripada kelompok yang berpendidikan SLTP. Banyaknya pencari kerja berpendidikan SD kebawah tersebut tampaknya tidak terlepas dari semakin tingginya biaya pendidikan yang cukup memberatkan bagi masyarakat. Beratnya biaya pendidikan tersebut dirasakan baik oleh pegawai negeri, maupun petani yang penghasilannya tidak menentu karena ditentukan oleh musim dan kondisi alam yang sangat mempengaruhi hasil panen. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan mereka yang berpendidikan SD dan lebih rendah tersebut bila dikontrol dengan umur adalah kelompok umur tua (30 tahun ke atas).

**Tabel 4.6 :**  
**Penganggur/ Pencari Kerja Menurut Pendidikan**  
**Kabupaten Bangkalan**  
**1990, 2000 dan 2004**  
**(Persen)**

Pendidikan	1990	2000	2004
(1)	(2)	(3)	(4)
T.S / Tdk Tmt SD	74,1	40,0	31,5
SD	20,5	41,0	48,7
SMP	2,0	7,9	11,3
SMA	3,0	9,8	7,6
Diploma / PT	0,4	1,3	1,0
<b>Jumlah</b>	100,0	100,0	100,0
<b>(N)</b>	<b>10.137</b>	<b>11.726</b>	<b>26.357</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Bangkalan, Pengolahan Data Tape

Jumlah penganggur berpendidikan SMA meningkat dari 3,0 persen (tahun 1990) menjadi 7,9 persen (tahun 2000) dan 7,6 persen (tahun 2004). Namun demikian, walaupun pada tahun 2004 persentase penganggur yang berpendidikan SMA menurun tetapi angka nominalnya menunjukkan peningkatan yaitu dari 1.149 orang menjadi 2003 orang. Kecenderungan meningkatnya ketidaksesuaian antara disatu pihak besarnya "supply" pencari kerja baru yang rata-rata telah mengenyam pendidikan setingkat SMA dan dipihak lain kecilnya "demand" yang dapat diciptakan oleh pembangunan ekonomi, terefleksi secara kongkrit pada membengkaknya angka pengangguran (terbuka maupun terselubung). Kondisi tersebut tampaknya sesuai dengan temuan dari hasil berbagai studi awal tahun 80-an (Jones dan Suprptilah, 1983; Sutomo, 1983; Tirtosudarmo, 1985; Widarti, 1985). Sementara itu penganggur dengan tingkat pendidikan Diploma/Sarjana kecil proporsinya hal tersebut dapatlah dimaklumi karena Universitas yang ada di Bangkalan masih relatif muda sehingga belum banyak mengeluarkan lulusan sarjana. Sementara bila ada pemuda atau pemudi yang melanjutkan kuliah di luar Bangkalan sangat kecil kemungkinan untuk kembali ke Bangkalan untuk mencari kerja tetapi akan memilih bekerja di luar Bangkalan.

**Tabel 4.7 :**  
**Lowongan Kerja Yang Terdaftar, Pencari Kerja Yang Terdaftar,**  
**Ditempatkan Dan Dihapuskan Menurut Pendidikan**  
**Di Kabupaten Bangkalan, Desember 2005**

Tingkat Pendidikan	Lowongan Kerja	Pencari Kerja	Penempatan	Dihapuskan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD ke bawah	9	0	0	20
SLTP	201	1	0	43
SLTA	19	92	0	496
Diploma I	1	6	0	12
Diploma II	6	6	0	44
Diploma III	0	0	0	0
Sarjana	29	56	0	202

*Sumber: Disarikan dari Laporan Ikhtisar Statistik Antar Kerja IPK-III Desember 2005, Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Bangkalan.*

Pencari kerja berpendidikan SLTA sebanyak 92 orang, 65 diantaranya adalah lulusan SLTA umum dan sisanya adalah lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Bila dikaitkan dengan lowongan kerja yang terdaftar, dari 19 lowongan kerja yang tersedia untuk lulusan SLTA, bila diteliti lebih lanjut ternyata hanya dibutuhkan satu orang saja yang dari lulusan SMK yaitu dari jurusan administrasi kantor. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa lulusan SMK masih belum terakomodasi dalam pengisian lowongan kerja yang tersedia. Selain lulusan SMK yang belum terakomodasi tampaknya terungkap pula dari studi ini bahwa lulusan Madrasah Diniyah juga kurang mendapat kesempatan untuk mengisi lowongan kerja. Ini terbukti dari 201 lowongan kerja untuk mereka yang berpendidikan SLTP, tidak ada lowongan kerja untuk lulusan Madrasah.

### *Setengah Penganggur*

Secara umum, berdasarkan data tahun 1990, 2000 dan 2004, pekerja di Kabupaten Bangkalan yang termasuk kategori setengah penganggur yaitu memiliki jam kerja pendek yaitu lebih dari 65 persen dengan jam kerja 36 jam atau kurang. Bila diperhatikan lebih lanjut menurut lapangan pekerjaan, ternyata mereka yang tergolong setengah penganggur adalah yang bekerja di lapangan pekerjaan pertanian (sektor A). Bila diperhatikan lebih lanjut, berdasarkan data yang tersedia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

setengah penganggur dari 77,9 persen pada tahun 1990 menjadi 92,6 persen tahun 2000 dan mengalami penurunan kembali menjadi 79,3 persen pada tahun 2004. Meningkatnya persentase setengah penganggur pada periode 1990-2000 karena bekerja di pertanian tidaklah sepanjang waktu, tetapi banyak waktu-waktu kosong pada saat menunggu panen. Demikian pula dalam hal pengolahan lahan hanya diperlukan paruh waktu. Pada tahun 2004 setengah penganggur di sector A mengalami penurunan, sementara di sektor M dan S mengalami kenaikan. Meningkatnya setengah penganggur di sektor M dan S dapatlah dimaklumi karena terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak hingga ke tingkat kabupaten sehingga mempengaruhi kestabilan sektor M dan S tersebut.

**Tabel 4.8 :**  
**Jumlah Jam Kerja Tenaga Kerja Selama Seminggu Terakhir**  
**Menurut Lapangan Kerja Di Kabupaten Bangkalan**  
**Tahun 1990, 2000 dan 2004**  
**(Persen)**

Lapangan Kerja	< 15 Jam	15 – 36 Jam	37 – 42 Jam	> 42 Jam	JUMLAH	N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tahun 1990						
• A	22,3	55,6	8,6	13,5	100,0	175.755
• M	8,8	36,1	12,2	42,9	100,0	33.752
• S	8,1	38,8	18,0	35,1	100,0	81.510
Jumlah	16,7	48,7	11,7	22,9	100,0	291.017
Tahun 2000						
• A	43,6	49,0	4,3	3,1	100,0	253.426
• M	3,4	35,1	21,4	40,1	100,0	37.904
• S	4,9	33,1	20,3	41,7	100,0	81.358
Jumlah	31,0	44,1	9,6	15,3	100,0	372.688
Tahun 2004						
• A	24,7	54,6	12,2	8,5	100,0	208.221
• M	6,7	37,9	19,1	36,3	100,0	29.512
• S	5,9	39,5	19,4	35,2	100,0	104.784
Jumlah	17,4	48,6	14,9	19,1	100,0	342.528

Sumber : BPS, Kabupaten Bangkalan, Pengolahan Data Tape



## BAB V

### PENUTUP

Sejarah mobilitas ke luar bagi penduduk Bangkalan sudah cukup lama. Laju pertumbuhan penduduk selama ini selalu menunjukkan pertumbuhan yang rendah (di bawah satu persen), terutama sebelum tahun 90-an. Sebagai akibat dari mobilitas keluar penduduk Bangkalan, sehubungan potensi alamnya yang relatif miskin untuk usaha pertanian serta peluang usaha lainnya. Namun pada tahun 2000-an laju pertumbuhan penduduk di kabupaten ini meningkat tajam mencapai di atas tiga persen. Diperkirakan laju pertumbuhan yang mencolok tersebut karena faktor migrasi masuk sebagai akibat meningkatnya peluang usaha/ kerja di luar pertanian dan adanya migran kembali akibat konflik Sampit. Ada perubahan struktur penduduk menurut umur selama 10 tahun terakhir (1995-2005), di mana jumlah dan proporsi penduduk muda makin menurun. Sedangkan jumlah dan proporsi penduduk dewasa dan lansia meningkat. Ini berarti bahwa di Kabupaten Bangkalan sudah terjadi transisi demografi, meskipun belum begitu drastis. Peningkatan penduduk usia dewasa akibat transisi demografi tersebut berarti juga terjadi peningkatan (jumlah dan proporsi) penduduk usia kerja dan sekaligus peningkatan jumlah angkatan kerja.

Dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangkalan selama 14 tahun terakhir telah terjadi transisi perekonomian dari sektor tradisional (sektor) ke sektor modern (sektor M dan S) meskipun belum begitu mencolok. Transisi tersebut juga berdampak terhadap penyerapan angkatan kerjanya, di mana proporsi mereka yang bekerja di sektor tradisional (sektor A) cenderung menurun, sedang di sektor modern (sektor M dan S) ada kecenderungan meningkat. Transisi penyerapan antar sektor tersebut juga tercermin dari status pekerjaannya, di mana mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu anggota keluarga dan pekerja keluarga cenderung menurun. Sedangkan mereka yang berstatus sebagai karyawan/ buruh dan berusaha dibantu buruh tetap cenderung terjadi peningkatan. Transisi penyerapan antar sektor tersebut juga dibarengi oleh adanya peningkatan tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin tinggi.

Transisi perekonomian dan transisi penyerapan angkatan kerja antar sektor tersebut selama 14 tahun tersebut sayangnya telah mengakibatkan terjadinya penurunan proporsi angkatan kerja yang bekerja/ terserap (*employment rate*) di Kabupaten Bangkalan. Dampak yang menyedihkan adalah tingkat pengangguran terbuka (*unemployment rate*) cenderung terus

meningkat. Ini menunjukkan bahwa pengembangan perekonomian di sektor M dan S yang dikembangkan di Kabupaten Bangkalan belum mengarah ke padat karya atau yang menyerap angkatan kerja banyak. Hal ini terbukti tingkat pengangguran masih cenderung meningkat. Di samping itu, makin meningkatnya jumlah angkatan kerja baru yang berpendidikan tinggi, lebih memilih lapangan pekerjaan atau sektor modern. Apabila mereka belum terserap di sektor modern lebih baik mereka menganggur sambil menunggu lowongan/ peluang kerja di sektor modern yang sesuai dengan bidang/ jurusan pendidikannya.

Bagi Kabupaten Bangkalan selesainya pembangunan jembatan SUROMADU yang menghubungkan Kota Surabaya – Pulau Madura lewat Bangkalan merupakan kunci akan berkembangnya perekonomian Kabupaten Bangkalan. Apabila jembatan tersebut betul-betul selesai dalam tahun 2008, akan banyak lapangan usaha yang dapat dibuka. Antara lain fasilitas pergudangan/peti kemas (akan dipindahkan dari Surabaya), fasilitas pelabuhan, galangan kapal, industri pupuk, industri semen. Apabila lapangan kerja banyak diciptakan, banyak penganggur angkatan kerja baru yang dapat diserap. Untuk menyongsong kesempatan kerja yang akan tercipta di Kabupaten Bangkalan setelah jembatan SUROMADU selesai dibangun, perlu disiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan dibutuhkan. Sekolah-sekolah kejuruan atau politeknik-politeknik yang akan dibutuhkan perlu dibuka atau dikembangkan. Di Bangkalan ada universitas baru (Universitas Trunojoyo) perlu membuka program-program diploma maupun S1 yang sesuai dengan kebutuhan industri atau pelayanan (*services*) yang terkait dengan kegiatan pelabuhan.

Bangkalan sebagai kabupaten yang sebagian besar wilayahnya memiliki pantai serta memiliki garis pantai yang panjang, sektor perikanan laut merupakan salah satu prioritas unggulan. Sektor ini juga akan banyak menyerap angkatan kerja, apabila masyarakat pantai diberdayakan. Pemberdayaan berupa pemberian pinjaman modal untuk mengusahakan armada laut dalam dan alat tangkap sumber daya laut yang ramah lingkungan, agar mereka mendapatkan hasil tangkapan dan penghasilan yang memadai. Kelemahan masyarakat pantai karena tidak memiliki modal usaha untuk mengusahakan armada laut dalam dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Karena miskin mereka hanya mampu menangkap sumber daya laut di pinggiran pantai atau kadang merusak ekosistem di laut.

## Rekomendasi

- Untuk menyambut era industrialisasi apabila jembatan SUROMADU selesai dibangun akan banyak kesempatan kerja yang tercipta. Perlu ada kebijakan dari pihak Pemda Kabupaten Bangkalan bahwa para investor yang masuk ke daerah ini untuk membuka lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja atau lebih *labour intensive*, agar banyak angkatan kerja daerah ini dapat terserap.
- Dalam menyambut era industrialisasi tersebut penyiapan tenaga kerja daerah perlu segera dilakukan. Di Kabupaten ini ada Universitas Negeri Trunojoyo dan Sekolah Menengah Kejuruan seharusnya program-program studi yang dilakukan adalah yang sesuai dengan kesempatan kerja yang akan dibuka di kabupaten tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar para calon tenaga kerja setempat tidak kalah bersaing dengan para calon tenaga kerja dari luar. Apabila nanti para investor banyak yang masuk dan banyak kesempatan kerja dibuka, namun apabila calon tenaga kerja setempat tidak siap menyambungnya, pasti kesempatan kerja tersebut akan banyak diambil tenaga kerja dari luar.
- Penyiapan kualitas tenaga kerja tidak hanya menjadi tanggung perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kejuruan, bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan perlu segera membuat perencanaan untuk pelatihan-pelatihan untuk menyambut era industrialisasi. Dalam hal ini dengan perencanaan latihan yang sesuai dengan kebutuhan industri/ kesempatan kerja yang akan dibuka.
- Sesuai dengan potensi wilayahnya, seperti potensi perikanan laut dan pertanian perlu dikembangkan sektor manufaktur/ agroindustri yang mampu mengolah hasil-hasil dari perikanan dan pertanian tersebut. Di samping meningkatkan nilai tambah dari hasil sektor-sektor tersebut, juga membuka kesempatan kerja baru. Untuk ke arah pengembangan sektor agroindustri tersebut perlu diberdayakan para pelaku di perikanan (nelayan) dan pertanian (petani). Dengan cara meningkatkan ketrampilan dan kemampuan teknologi dan pemberian pinjaman permodalan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris (1997)  
Peran Analisis Demografi dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, dalam *Widjojo Nitisastri 70 tahun, Pembangunan Nasional: Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan*, Moh. Arsjad Anwar (Ed), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- (Ed), (1998)  
*Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Demografi- UI.
- Ananta, Aris dan Sri Moertiningsih Adioetomo (1990)  
*Perkembangan Penduduk Indonesia Menuju Tahun 2005*, Jakarta : Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ananta, Aris dan Evi Nurvidya Anwar dan Chotib (1994)  
*Indonesia : A Country of Many Different Stages of Demographic Transition*, Jakarta : Ministry for Population/ National Family Planning Coordinating Board.
- Bandiyono, Suko, Daliyo dan Yulfita Raharjo (1993)  
*Indeks Perkembangan Manusia Kalimantan Timur 1980-1990*, PPT-LIPI bekerja sama dengan Pemda Tingkat I Kalimantan Timur, Jakarta : Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan – LIPI.
- Bappenas (2003)  
*Fleksibilitas Kebijakan Pasar Kerja untuk Memperluas Kesempatan Kerja*, Working Papers Series No. 2 Pusat Kajian Asia Timur, Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya . Jakarta.
- BPS (1992)  
*Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 1990*, Seri S2, Jakarta
- BPS (2004)  
*Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 1997- 2003*, BPS.
- BPS & Bappeda Kab. Bangkalan (2006)  
*Bangkalan Dalam Angka 2005*, Bangkalan : Kerjasama Bappeda Kab. Bangkalan dengan BPS Kab. Bangkalan.

- Daliyo (1996)  
'Pemuda Yang Bekerja' dalam Riwanto Tirtosudarmo (editor)  
'*Dinamika Sosial Pemuda di Perkotaan*', Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Dernberg dan Mc Dougall (1972)  
*Macro Economics, 4<sup>th</sup> edition*, McGraw-Hill, 1972.
- Hidayat (1982)  
Strategi Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia, dalam *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*, Prijono Tjiptoherijanto dkk (Ed), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
- Kuntowijoyo (none)  
*Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, Yogyakarta : Penerbit Mata Bangsa.
- Manning, Chris (1982)  
*Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Moertiningsih, S, (2005)  
*Bonus Demografi, Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*, disampaikan pada Pidato Disertasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi UI, Jakarta 30 April 2005.
- Pemprop. Jawa Timur (2005)  
*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008*, Surabaya : Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Pemkab. Bangkalan (2005)  
*Bangkalan Dalam Angka 2004*, Bangkalan : Pemerintah Kabupaten Bangkalan
- Pressat, Roland (none)  
*The Dictionary of Demography*, Oxford : Katerprint Co, Ltd.

Prijono Tjiptoheriyanto (2001)

*Kependudukan dalam Era Reformasi*, P2K UGM.

Spengler, Joseph J & Otis Dudley Duncan (1956)

*Demographic Analysis*, Illinois : The Free Press

Tri Pranadji (2004)

*Penduduk dan Perspektif Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No. 4 Desember 2004.

UNDP (2005)

*Human Development Report 2004*.

Widianto, Bambang, 2005

*Employment Creation Policy* , Conference 'Policy Options for an Employment Action Plan', Jakarta, 26-27 April, BAPPENAS and UNSFIR.

